

**IMPLEMENTASI QANUN NO 11 TAHUN 2002 TENTANG BERBUSANA
ISLAMI DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Syari'ah dan Hukum

OLEH :

TRIVANY MAULIDA

23151009



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

1441 H / 2020

**IMPLEMENTASI QANUN NO 11 TAHUN 2002 TENTANG BERBUSANA
ISLAMI DI KOTA LANGSA**

SKRIPSI

Oleh :

TRI VANY MAULIDA

NIM: 23151009

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag
NIP. 19591915 199703 2 001

Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui:
Ketua Jurusan Siyasah Fakultas
Syariah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Fatimah, MA
NIP. 19710320 1997033 2 003

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami Di Kota Langsa, telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan, pada tanggal 19 Agustus 2020.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu syari'ah pada Jurusan Siyasah.

Medan, 19 Agustus 2020

Panitia Sidang Munaqasyah

Skripsi Fakultas Syariah dan

Hukum UIN SU

Ketua

Sekretaris

Fatimah S.Ag,MA

NIP. 19710320 199703 2 003

Zaid Al-Fauza, SH. MH

NIP.19880824 201503 1 004

Anggota-Anggota

Dr. Sahmiar Pulungan
NIP. 19591915 199703 2 001

Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA
NIP. 19791020 200901 10010 2 007
Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU

Dr. Zulham S.H,I, M.Hum

NIP. 1977 0321 200901 1 008

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Vany Maulida
NIM : 23151009
Jurusan : Siyasah
Tempat/ Tgl Lahir : Langsa, 10 Agustus 1997
Judul Skripsi : Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang
Berbusana Islami Di Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Saya siap menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Juni 2020

Tri Vany Maulida

NIM. 231151009

IKHTISAR

Sripsi ini berjudul: Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami Di Kota Langsa, Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah tentang penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 berkaitan dengan busana seharusnya digunakan oleh umat muslim khususnya kaum hawa. Busana Islami menurut Qanun No 11 Tahun 2002 yakni sama halnya menurut Al Qur'an dan Hadist serta para ulama. Batasan menurut Qanun ini adalah memakai pakaian yang longgar, tidak tipis, tidak membentuk lekukan tubuh, serta menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah ingin membahas bagaimana penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami di Kota Langsa, bagaimana respon masyarakat terhadap Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami di Kota Langsa serta bagaimana penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami terhadap wisatawan yang datang berkunjung di Kota Langsa.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan data yang diperoleh dari riset di lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis deduktif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Pemerintah yang bersangkutan terhadap Qanun No 11 Tahun 2002 yakni Kantor Dinas Syari'at Islam serta wilayahul hisbah yang sebagai penggerak dari Qanun tersebut, masyarakat yang ikut menerapkan Qanun tersebut, serta pengunjung yang hendak datang untuk berlibur di Kota Langsa.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : Konsep Peraturan Pemerintah Daerah dan Agama.

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah swt yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa Islam dengan melakukan perubahan dan pencerahan kepada umat manusia. Dalam rangka menyelesaikan studi pada strata satu ini penulis telah berupaya untuk mengangkat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:**IMPLEMENTASI QANUN NO 11 TAHUN 2002 TENTANG BERBUSANA ISLAMI DI KOTA LANGSA**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari sempurna sebagaimana yang diharapkan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari setiap pembaca demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan rasa hormat yang tulus, penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ayahanda H. Djumadi dan Ibunda tercinta Hj. Sudiem Terubus yang telah berjuang baik materi maupun immateri kepada saya, menjadi inspirasi, pembangkit semangat dan motivasi kepada penulis agar kiranya supaya selesai dari perkuliahan dengan sukses.
2. Kakak-kakak kandung penulis, Indah Mayasari, S.Pd dan Nurul Fadillah, S.Pd, M.Pd serta para abang ipar, Hermansyah, S.Pd dan Kamaruzzaman,

ST, yang telah banyak memberi semangat kepada penulis hingga sampai pada tahap akhir perkuliahan.

3. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus tercinta UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, S.HI. M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menjadi motivasi dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.
5. Ibu Dr. Sahmiar Pulungan, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis ketika menulis skripsi ini.
6. Ibu Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
7. Ketua jurusan siyasah Ibu Fatimah, MA dan sekretaris jurusan Bapak Zaid Alfauzah Marpaung, MH yang telah banyak membantu dalam hal perkuliahan hingga akhir dari perkuliahan ini.
8. Ibu Achiriah, penasehat akademik yang dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan yang banyak membantu dan memberi nasehat kepada penulis.
9. Bapak Drs. H. Ibrahim Latif, MM Selaku Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, Bapak Azhar, S.Sos.I selaku Kepala bidang hubungan masyarakat dan Ibu Nuraini, ST selaku Kepala bidang bimbingan dan penyuluhan syari'at Islam, serta seluruh staf-staf Dinas Syari'at Islam Kota

Langsa yang telah memberikan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini .

10. Siti Rahmana Hasibuan perwakilan mahasiswa UIN SU yang telah menemani penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian di Kantor Dinas Syari'at Islam Kota Langsa, serta teman-teman kos saya yang selalu membantu disaat membutuhkan saran.
11. Ali Muddin Usmana, M. Sadly Abdullah Manik dan Dela Salvinia yang telah banyak memberikan masukan saran dan semangat belajar dari awal perkuliahan hingga sampai pada tahap akhir perkuliahan.
12. Rekan-rekan mahasiswa Siyasah.A stambuk 2015, teman-teman KKN kelompok 87 Namoteras dan kepada seluruh sahabat-sahabat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan dan dalam hal lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu.

Akhir kalam kepada Allah jualah kita mohon ampun dan berserah diri, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi sumbangan untuk menegakkan ajaran-Nya dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 11 Juni 2019

Penulis

TRI VANY MAULIDA

NIM. 23151009

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	16
C. Tujuan penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kajian Terdahulu	18
F. Sistematika pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Pengertian Berbusana Islami	22
B. Batasan Aurat	29
C. Pengertian Qanun	32
D. Penjelasan singkat Qanun No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam	34

E. Wilayatul Hisbah.....	38
F. Sektor Wisata	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	54
A. Penerapan Qanun No 11 Tahun 2002	54
B. Respon masyarakat terhadap penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami	66
C. Penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami di Kota Langsa terhadap wisatawan yang berkunjung di Kota Langsa	68
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84
A. Dokumentasi	84

B. Sruktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kota Langsa.....	87
C. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 .	88

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai etika normatif bagi pemeluknya diharapkan dapat diwujudkan nilainya secara sempurna. Oleh karena itu, islam bukan agama yang hanya terbatas dalam kehidupan pribadi yang semata-mata mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi memberikan pedoman hidup yang utuh dan menyeluruh.

Lengkapnya nilai islam dalam mengatur kehidupan manusia, maka tidak ada fenomena kehidupan yang tidak terbatas dalam ajaran islam, termasuk aturan berbusana bagi kaum muslimah. Hal itu nampak jelas dari beberapa ayat Al Qur'an yang mengupas tentang busana muslimah, mulai dari pembahasan tentang aurat wanita sampai pada batasan atau kriteria busana muslimah itu sendiri.

Manusia adalah makhluk yang diberi keistimewaan dari makhluk yang lainnya oleh Allah SWT, yaitu salah satunya diberi akal dan pikiran sesuai dengan kemampuannya. Manusia tidak sama dengan makhluk hidup lainnya, mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Memang dahulu kala pada zaman purba manusia tidak pernah mengenal pakaian atau busana, apalagi busana muslimah yang pakaiannya serba menutup aurat.

Pembatasan perempuan dalam berbusana menurut islam adalah bertujuan untuk melindungi perempuan itu sendiri. Pencegahan awal ini untuk menjaga agar perempuan tetap mulia dan menjadi anggota masyarakat yang terhormat, serta sebagai pembinaan akhlak agar terhindar dari persaingan, dengki, dan lain-lain. Selain itu busana muslim bagi laki-laki juga menanamkan suatu tradisi yang

mendunia dan fundamental untuk mencabut akar-akar kemerosotan moral dengan menutup pintu pergaulan bebas.¹

Busana atau pakaian, berhubungan dengan peradaban manusia. Kebutuhan untuk berpakaian bukan hanya dirasakan manusia yang hidup di era industrialisasi, tetapi sejak zaman Nabi Adam AS. Sejak beliau dan istrinya terbujuk untuk memakan buah khuldi dan mereka mulai mengenal rasa malu bila auratnya terbuka, maka sejak inilah sebenarnya manusia mengenai pakaian sudah ada keterbatasan teknologi yang menyebabkan pakaian mereka hanya daun-daun surga.²

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak berkaitan dengan kesehatan, etika, estetika, tetapi juga berhubungan dengan kondisi sosial budaya, bahkan juga ekspresi ideologi. Bagi manusia pakaian tidak berdimensi keindahan, tetapi juga kehormatan bahkan keyakinan. Itulah sebabnya, aturan tentang pakaian termasuk yang dipandang penting oleh Allah SWT, sehingga tercantum dalam Al Qur'an yang mulia.

Berpakaian secara resmi, terutama bagi muslimah adalah bagian dakwah yang penting dalam syiar islam diseluruh dunia, karena petunjuknya jelas (*muhkamat*) dalam Al Qur'an. Dalam dalil-dalil Al Qur'an, busana muslimah merupakan ketentuan tata busana bagi kaum muslimah untuk menutup auratnya berdasarkan syariat islam. Salah satu pakaian yang merupakan petunjuk identitas dan pembeda

¹Husein Shahab, *Jilbab menurut Al Qur'an dan As Sunnah* (Jakarta: Mizan, 1983), hlm. 18, Juga dalam Istadiana, *Hikmah Jilbab dalam pembinaan akhlak* (Sala: Ramdhani, Tt), Baca juga Abu Abdillah Al Mansur, *Wanita dalam Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1986), hlm. 34.

² Sitoresmi Prabuningrat, *Gejolak Kebangkitan Busana Muslimah Di Indonesia*, dalam Aswab Machasin (eds), *Dalam Budaya Bangsa Konsep Estetika* (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), hlm. 256-257.

antara seseorang dengan yang lain, adalah jilbab, yang disebutkan dala (QS. Al-Ahzab [33] ayat 59):

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
(الأحزاب / ٥٩: ٣٣)

*Artinya : Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*³

Menurut pandangan Ibn Katsir berkata: “Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk memerintah kaum wanita untuk mengenakan jilbab, pakaian longgar yang menutupi baju mereka, ke seluruh tubuh mereka, agar mereka tampil berbeda dengan ciri-ciri kaum wanita Jahiliyah. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan bahwa Ibn Abbas pernah berkata, Allah memerintahkan kaum wanita pada saat pergi keluar rumah mereka untuk suatu keperluan, agar menutupi wajah mereka dari atas kepala mereka dengan jilbab dan hanya memperlihatkan sebelah matanya saja. Muhammad Ibn Sirin pernah bertanya kepada Abidah As-Salamani tentang maksud ayat 59 surah Al-Ahzab di atas, lalu Ubaidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya, dengan hanya memperlihatkan mata kirinya saja. Ibn Abi Hatim dengan sanadnya menyebutkan bahwa, Pada saat ayat di atas turun,

³Al Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI (Bandung: Diponegoro, 2008), 33:59.

kaum wanita Anshar pergi keluar dan seakan-akan burung-burung gagak bertengger di atas kepala mereka, saking tenangnya mereka, dan ketika itu mereka mengenakan pakaian-pakaian berwarna hitam.”

Ayat di atas juga menjelaskan ketentuan tentang pakaian yang wajib dikenakan wanita muslimah. Pakaian tersebut adalah jilbab dan sejenisnya yang menutup seluruh tubuhnya. Bagi para wanita, mereka tidak boleh merasa diperlakukan diskriminatif tapi faktanya, memang terdapat perbedaan mencolok antara tubuh wanita dan tubuh laki-laki, sehingga wajar jika ketentuan terhadapnya pun berbeda.⁴ Keadilan tidak selalu harus sama jika memang faktanya berbeda, solusi terhadapnya pun juga tidak harus sama. Syari’at yaitu jalan atau aturan sedangkan Syari’at Islam yaitu tata cara pengaturan tentang sikap perilaku manusia guna mencapai ridha Allah. Sumber Syari’at yang dipahami sebagai hukum Ilahi memiliki dua sumber yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah. Al-Qur’an adalah firman Allah yang tidak dapat diubah sedangkan As-Sunnah adalah kehidupan dan contoh dari Nabi Muhammad. Kehidupan Nabi dijadikan sumber Syari’at.

Dalam Islam terdapat pula perbedaan desain pakaian antara laki-laki dan perempuan. Apabila pada keumuman masyarakat mungkin hanya didasari alasan untuk menunjukkan jenis kelamin. Lebih dari itu, dalam Islam terdapat aturan tentang mesti berbedanya cara berpakaian antara laki-laki dengan perempuan.

Aceh adalah sebuah provinsi terletak disemenanjung pulau Sumatera yang merupakan kesatuan masyarakat hukumnya yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 74.

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁵

Masyarakat Aceh dalam sejarahnya yang cukup panjang telah lama berkenalan dengan Agama Islam dan menjadikan Agama Islam sebagai pedoman hidupnya. Syari'at Islam merupakan sebuah sistem hukum Islam sebagaimana sistem hukum lainnya, yang mencakup perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan sebagainya. Dan Qanun merupakan Undang-undang yang lebih bersifat ditetapkan manusia yang ada kalanya di pungut dari hukum fiqh dan sebagainya, dalam Qanun ini hukum bersifat tegas dan memiliki sanksi berbeda apabila hanya menjadi hukum Syara' yang lebih bersifat akhirat. Namun dalam hal ini Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh.

Keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggaran yang dicambuk, berapa Qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidak pelanggaran. Keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan Qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.

⁵UU RI No 11 Tahun 2006, Pasal 1 ayat 2.

Pelaksanaan Syari'at agama Islam di Aceh secara yuridis baru benar-benar diakui dan dilembagakan melalui undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁶ Pelaksanaan Syari'at Islam yang dimaksud adalah sebagai bentuk perwujudan kewenangan khusus bagi Aceh dibidang penyelenggaraan kehidupan beragama dengan tetap menjadi kerukunan hidup antar umat beragama, yang selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 oleh DPRD Aceh tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh sejak dulu, kini telah terwujud dan berjalan di bumi Serambi Mekkah, pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.

Pada saat ini Aceh telah menyusun beberapa Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Syari'at Islam, antara lain :

1. Qanun Provinsi Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam,
2. Qanun Provinsi Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam,
3. Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam,
4. Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Provinsi Aceh No.13 tahun 2003 tentang Maisir dan

⁶UU Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.

5. Qanun Provinsi Aceh No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*.⁷

Peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Kemudian undang-undang menetapkan Qanun Provinsi sebagai peraturan pelaksanaan untuk penyelenggaraan otonomi khusus yang menjadi wewenang Pemerintah provinsi. Untuk membuat Qanun, Pemerintah Provinsi tidak perlu menunggu peraturan pemerintah atau peraturan lainnya dari Pemerintah Pusat. Qanun adalah peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi khusus yang dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lain berdasarkan asas “peraturan khusus dapat mengesampingkan peraturan umum.” Dengan kata lain, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan Pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh.⁸

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 yang berisi Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi’ar Islam merupakan sumber yang digunakan untuk peraturan tentang busana Islami. Busana Islami dalam Islam termasuk dalam syi’ar Islam. Sebagaimana dikemukakan dalam Qanun No 11 Tahun 2002 Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5 dan Bab V Penyelenggaraan Syi’ar Islam pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :⁹

⁷ Rozi Ramanda, *Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah, Ibadah Dan Syi’ar Islam Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013-2016*, Vol, 5, No. 1 (April 2018), hlm. 2.

⁸ Marzuki Abubakar, *Syari’at Islam Di Aceh Sebuah Model Kerukunan dan Kebebasan Beragama*, Vol, XIII, No 1 (Januari-Juni 2011), hlm. 102.

⁹http://www.idih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_Aceh_11_2002.pdf, diakses pada 27 Februari pukul 13:00 WIB.

Pasal 1 ayat 5 Bab I Ketentuan Umum : “Dalam Qanun yang dimaksud dengan, syi’ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan ajaran Islam.”

Pasal 13 ayat 1 dan ayat 2 Bab V Penyelenggaraan syi’ar Islam: Ayat 1, “Setiap orang Islam wajib berbusana Islami”, ayat 2, “Pimpinan instansi Pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha, dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungan.”¹⁰

Syi’ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam. Didalam penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang syi’ar Islam kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah dan mengagungkan pelaksanaan syariat islam ialah bagaimana setiap masyarakat baik instansi pemerintah wajib berbusana islami, wanita maupun pria.¹¹

Indonesia dalam UUD 1945 tidak termaktub dan tidak tertulis tentang kewajiban berbusana Islami, yang tertulis hanya keterangan kebebasan dalam beragama dan menganut ajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam UUD pada pasal 28E sampai pasal 29 yang mengandung penjelasan bahwa kebebasan agama mengatur busana yang baik buat para pengikutnya. Busana Islami hanya kewajiban pada umat Islam namun tidak dengan agama lain.¹² Jadi

¹⁰Qanun Nomor 11 Tahun 2002.

¹¹Qanun Nomor 11 tahun 2002 Pasal 13.

¹²UU 1945 Pasal 28 E dan Pasal 29.

dalam peraturan Qanun Aceh tentang busana Islami merupakan peraturan hanya untuk menganut agama Islam tidak dengan agama lain.

Berdasarkan dengan adanya Qanun No 11 Tahun 2002, penggunaan pakaian menjadi kewajiban bagi masyarakat muslim Aceh, dimana terdapat masyarakat yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi berupa sanksi *ta'zir*. Karena dalam pasal 13 dan pasal 23, bahwasanya kriteria pemakaian busana islami yang sesuai dengan pasal 13 yaitu menggunakan pakaian yang menutup aurat, baik, sopan, tidak menunjukkan lekukan tubuh, serta tidak menimbulkan syahwat bagi yang melihat.¹³

Kota Langsa ikut serta dalam mengimplementasikan Qanun No 11 tahun 2002 dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat muslim yang berakhlak mulia serta berperilaku yang sesuai dengan ketentuan syariat islam. Batasan pakaian yang sesuai dengan Qanun No 11 Tahun 2002 menurut pemerintah Kota Langsa, yakni:

- a. Menutup aurat. Bagi wanita semua aurat terkecuali telapak tangan dan wajah, sedangkan pria antara pusat sampai lutut.
- b. Untuk kaum wanita pakaian yang digunakan harus longgar tidak diperbolehkan yang membentuk bagian tubuh. Untuk memakai celana diperbolehkan, tetapi ukurannya harus longgar, tidak yang ketat.
- c. Pakaian yang digunakan tidak boleh tipis.
- d. Pakaian harus dari bahan yang suci.

¹³Qanun Nomor 11 tahun 2002 Pasal 13 dan Pasal 23.

Secara terminologis terdapat beberapa definisi tentang, Aqidah, antara lain Hasan Al-Banna mengatakan, Aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati manusia, mendatangkan ketenteraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairy sebagaimana dikutip Yunahar Ilyas mengatakan, Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fithrah. Kebenaran itu dibentuk oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.

Menurut perkataan Drs. H. Ibrahim Latif, MM selaku Kepala Dinas Syari'at Islam di Kota Langsa, *"Di Langsa sendiri sudah tidak masalah lagi dengan adanya penyimpangan aqidah. Jadi bisa dikatakan pada bidang aqidah masyarakat Kota Langsa sangat sesuai dengan yang diharapkan."*¹⁴

Jadi dari perkataan Kepala Dinas Syari'at Kota Langsa, penerapan pada bidang aqidah berjalan lancar dan sesuai dengan Qanun yang telah ditetapkan.

Secara umum Ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap pencipta-Nya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadaNya. Ibadah menurut bahasa etimologis adalah diambil dari kata ta'abbud yang berarti menundukkan dan mematuhi dikatakan thariqun mu'abbad yaitu: jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda' yang berarti menghamba. Jadi, meyakini bahwasanya

¹⁴Hasi wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at Islam Kota Langsa.

dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhan Nya.

Penulis juga menanyai bidang ini pada Kepala Dinas Syari'at Islam, dan beliau berkata *“untuk Ibadah sendiri itu menyangkut pada kepribadian pada diri sendiri, saya disini bisa berkata pada bidang ibadah Kota Langsa sendiri termasuk menaatinya, contohnya seperti dilakukan program tertib Jumat, itu ada tim dari Wilayatul Hisbah (WH) yang perempuan mengawasi menjelang Shalat Jumat, cara yang dilakukan melalui pengeras suara, dan tanpa adanya ini warga Kota Langsa yang laki – laki pun mentaati kewajiban mereka untuk sholat jum'at.”*¹⁵

Jadi dapat disimpulkan penerapan pada bidang ibadah ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan peraturan Qanun yang telah ditetapkan.

Dan syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam. Didalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Syi'ar Islam kegiatan yang mengandung nilai-nilai Ibadah dan mengagungkan pelaksanaan Syariat Islam ialah bagaimana setiap masyarakat baik instansi pemerintah wajib berbusana muslim baik itu wanita ataupun pria. Seperti yang dikatakan bapak Drs. H. Ibrahim Latif, MM : *“Didalam Syi'ar Islam ada namanya razia tertib berbusana muslim, masyarakat yang melewati jalan dan razia tertib busana muslim*

¹⁵Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at Kota Langsa.

dilakukan dengan tim gabungan. Mengenai lokasi razia ,itu ditentukan oleh Wilayatul Hisbah(WH) sendiri yang sesuka hati mereka memilih lokasi.”¹⁶

Dari penjelasan tersebut, menurut aparat pemerintah Qanunini belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, dengan ditandai tidak adanya kepastian kapan dan dimana saat melakukan aksi penerapan Qanun ini sendiri.

Penerapan syariat Islam tetap tidak mengalami penurunan semangat baik secara mental aparat pemerintah Kota Langsa dan juga semangat pembentukan ideologi syariat Islamnya. Hal ini dapat terlihat dari implementasi pemerintah Aceh dalam menugaskan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun, dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, serta pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang syariat islam, Dan juga melakukan razia busana muslim di Kota Langsa yang diterapkan setidaknya minimal 3 (tiga) kali dalam seminggu.

Selain itu pula, spanduk-spanduk sosialisasi mengenai berpakaian Islam menghiasi sudut-sudut Kota Langsa. Meskipun demikian, dengan diterapkannya Qanun No 11 tahun 2002 tentang busana islami oleh pemerintah, tetapi masih banyak masyarakat Langsa yang tidak mengimplementasikan busana yang sesuai dengan Qanun No 11 tahun 2002 terkhusus bagi wanita padahal pemerintah sudah

¹⁶Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syari'at Kota Langsa.

melakukan sosialisasi baik dari media cetak dan media online maupun sebagainya.

Dengan terjadinya peristiwa tersebut tentunya dengan tanpa niat ingin menyalahkan siapa pun. Seharusnya Qanun tersebut dapat terealisasi sepenuhnya dikarenakan mayoritas kota langsa masyarakatnya muslim. Berdasarkan fenomena mengenai insiden ini maka penulis melakukan kajian tentang implementasi Qanun No 11 tahun 2002 tentang berbusana islami yang berfokus pada pelebagaan aspek internal (pemerintahan) dan aspek masyarakat.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh melaksanakan Kegiatan Sidang Paripurna ke IV pada bulan Mei 2014, dibuka oleh Ketua MPU Aceh Drs. Tgk.H. Gazali Mohd. Syam dan diikuti oleh 44 orang peserta, terdiri dari Pimpinan dan Anggota MPU Aceh yang berasal dari utusan provinsi dan utusan Kabupaten/Kota se-Aceh. Agenda Sidang Paripurna adalah mengenai “Pariwisata dalam Pandangan Islam”. Dalam rumusan Keputusan Sidang/Fatwa yang dihasilkan dalam Sidang Paripurna MPU Aceh, disampaikan poin-poin keputusan tentang Pariwisata dalam Pandangan Islam, yaitu :¹⁷

Pertama : FATWA

Satu : Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.

¹⁷www.kemenpar.o.id/userfiles/2015, Berdasarkan jurnal kemenpar 2015 *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Diunduh pada 27 Februari 2020, pukul 13:00 WIB.

Dua : Pariwisata yang di dalamnya terkandung unsur-unsur kemaksiatan hukumnya haram.

Tiga : Pariwisata yang didalamnya terkandung nilai-nilai kemaslahatan hukumnya mubah (boleh).

Kedua : TAUSHIYAH

Satu : Pemerintah Aceh diharapkan untuk lebih mengedepankan nilai-nilai Syariat Islam dalam pembangunan pariwisata di Aceh.

Dua : Pemerintah Aceh diharapkan untuk menyusun buku panduan wisata yang berbasis Syariat Islam bersama lembaga dan instansi terkait.

Tiga : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mensosialisasikan wisata Syariah kepada pengelola wisata dan masyarakat.

Empat : Masyarakat Aceh diharapkan untuk turut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pariwisata.

Lima : Pemerintah Aceh diharapkan untuk mempersiapkan SDM pemandu wisata profesional yang memahami syariat kearifan local.

Enam : Pemerintah Aceh lebih memprioritaskan promosi wisata Syariah ke luar daerah dan negara-negara muslim.

Tujuh : Pemerintah Aceh mempersiapkan sarana ibadah yang memadai pada lokasi-lokasi wisata.

Delapan : Pemerintah Aceh menempatkan personil Wilayatul Hisbah dan petugas terkait lainnya pada lokasi-lokasi wisata.¹⁸

Sembilan : Pemerintah Aceh memberikan sanksi bagi pengelola wisata dan wisatawan yang melanggar nilai-nilai syariat islam yang telah tertulis di undang-undang MPU Aceh.¹⁹

Keseriusan walikota untuk mengembangkan sektor pariwisata, karena industri pengolahan kayu dan yang lainnya yang dahulu menjadi kebangkitan ekonomi masyarakat daerah ini telah ditutup. Walikota membuka dua destinasi pariwisata yaitu Langsa Mangrove Forest Park dan Taman Hutan Kota. Dengan adanya destinasi wisata ini membuka ruang untuk para wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Langsa. Dengan demikian akan banyak wisatawan yang berkunjung ke Kota Langsa baik itu wisatawan muslim maupun wisatawan non muslim.

Penulis sangat tertarik mengambil judul ini dikarenakan sebelumnya penulis melihat di Kota Langsa sendiri sudah ada peraturan yang mengatur tentang busana islami yang sesuai dengan ajaran agama Islam, tetapi penulis melihat masih banyak masyarakat Kota Langsa tidak menerapkan peraturan tersebut di kehidupan mereka masing – masing. Aparatur pemerintah sudah berkali – kali melakukan razia bagi masyarakat yang masih berpakaian ketat bahkan tidak mengenakan jilbab, disetiap sudut Kota Langsa sendiri terpasang spanduk–

¹⁸www.kemenpar.o.id/userfiles/2015, Berdasarkan jurnal kemenpar 2015 *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Diunduh pada 27 Februari 2020, pukul 13:00 WIB.

¹⁹www.kemenpar.o.id/userfiles/2015, Berdasarkan jurnal kemenpar 2015 *Kajian Pengembangan Wisata Syariah*. Diunduh pada 27 Februari 2020, pukul 13:00 WIB.

spanduk yang menyiarkan Qanunno 11 tahun 2002 dengan tujuan agar tidak ada lagi masyarakat yang berpakaian layaknya bukan orang Islam.

Penulis juga sudah melakukan wawancara kepada salah satu aparaturn pemerintahan untuk menguatkan penelitian ini dan terdapat banyak perbedaan dengan penulis yang lain meskipun membahas dengan Qanun yang sama. Dan dipenelitian ini penulis mengangkat masalah penerapan Qanun no 11 tahun 2002 di Kota Langsa, tanggapan masyarakat Kota Langsa serta untuk para wisatawan yang datang ke Kota Langsa sedangkan penulis yang lain hanya membahas peran wilayahul hisbah terhadap Qanun no 11 tahun 2002 sedangkan disini penulis membahas penerapan Qanun tersebut menurut Pemerintah, Masyarakat serta para wisatawan yang datang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, penulis menginginkan adanya sebuah penelitian secara mendalam tentang **“Implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami di Kota Langsa”**, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi Qanun tersebut di kehidupan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis disini merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana Islami di Kota Langsa?
2. Bagaimana respon masyarakat Kota Langsa terhadap penerapan Qanun No 11 Tahun 2002?

3. Bagaimana penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana islami di Kota Langsa terhadap wisatawan yang berkunjung di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis, penulis memiliki tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pemerintah dalam mengimplementasikan Qanun No 11 Tahun 2002 di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat Kota Langsa terhadap implementasi Qanun No 11 Tahun 2002.
3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana islami di Kota Langsa terhadap wisatawan yang berkunjung di Kota Langsa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang bisa dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari. Khususnya terhadap mahasiswa yang mengkaji tentang berbusana muslim yang sebagaimana layaknya islam mengajarkan.
2. Secara praktis maka di harapkan pada hasil penelitian ini dapat menyalurkan ide-ide pemikiran yang berguna untuk saya maupun masyarakat pada umumnya untuk lebih mendalami ilmu agama tentang berbusana muslim dan dipraktekkan pada kehidupan sehari-hari.

E. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian yang relevan merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk memberitahukan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah :

1. M. Farid Wajdi Gumilang dalam skripsinya yang berjudul *Jilbab Dalam Pasal 13 Ayat 1 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam*, peneliti berusaha menjelaskan bahwa pentingnya jilbab bagi kaum wanita agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, sesuai dengan keputusan Pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Aceh membuat Perda Syariah adalah keputusan yang berdasarkan pemberhentian konflik dan sudah tepat dikarenakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Sehingga Qanun Aceh tentang wajib berjilbab tidak bertentangan dengan UUD karena sinkron dengan aturan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan UUD karena prosedur dalam aturan UUD sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Agus Rahman dalam skripsinya yang berjudul *Peran Wilayatul Hisbah Mensosialisasikan Qanun No 11 Tahun 2002 Di Kabupaten Simeulue*

Provinsi Aceh, didalamnya Wilayatul Hisbah (WH) melakukan sosialisasi Qanun tersebut dengan melaksanakan ceramah agama di mesjid-mesjid, di pengajian-pengajian, sekolah-sekolah, perwiritan dan organisasi remaja. Wilayatul Hisbah juga melakukan penyuluhan untuk memberikan pembinaan, pemahaman, dan penyadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan Syari'at Islam secara kaffah dan ikhlas. Sosialisasi juga dilakukan dengan cara membagi-bagi brosur, melakukan aksi simpatik membagikan jilbab kepada orang yang belum memakai jilbab.

3. Susanti Hasibuan didalam tesisnya yang berjudul Regulasi Penerapan Busana Islami: Studi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Di Aceh Ditinjau dari Perspektif Dakwah, yang terpenting didalam tesis ini yaitu syari'at Islam yang tertuang dalam Qanun adalah bentuk dakwah kontemporer. Posisi Qanun di Aceh dalam Hirarki perundang-undangan Negara terbukti sah, serta Qanun No 11 Tahun 2002 yang merupakan konfigurasi politik melalui jalur otonom dan Peraturan Daerah di Indonesia, meskipun penerapan Qanun Busana Islami terbukti belum mampu menurunkan jumlah pelanggaran dan kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan.

Jadi yang membedakan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini berfokus pada penerapan yang dilakukan Pemerintah terhadap Qanun No 11 Tahun 2002 tentang busana islami di Kota Langsa, untuk masyarakat Kota Langsa dalam menerapkan peraturan ini, tidak hanya itu

peraturan ini juga berlaku kepada para wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Langsa. Untuk para wisatawan yang berkunjung juga diberlakukan peraturan ini kecuali bagi masyarakat maupun wisatawan yang bukan Bergama Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori. Dalam bab ini, penulis akan membahas dasar materi yang terdapat didalam pembahasan, dan penulis juga mencantumkan beberapa instansi yang mendukung dalam implementasi Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana islami di Kota Langsa.

Bab III Deskripsi tentang Kota Langsa. Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang letak geografis, letak demografis, serta sektor pariwisata yang terdapat di Kota Langsa.

Bab IV Jawaban dari hasil penelitian. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai literatur-literatur informasi dari para informan untuk mendapatkan jawaban atau informasi mengenai judul yang akan diteliti ini.

Bab V Penutup. Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini dan juga saran atau rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Berbusana Islami

Jilbab dalam Islam berasal dari kata *jalaba* yang artinya menghimpun atau membawa.²⁰ Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab dikenal dengan istilah *khimar*, dan bahasa Inggris jilbab dikenal dengan istilah *veil*. Selain kata jilbab untuk menutup bagian dada hingga

²⁰Alfatri Adlin, *Menggeledah Hasrat: sebuah Pendekatan Multi Perspektif* (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm. 343.

kepala wanita untuk menutup aurat perempuan, dikenal pula istilah kerudung, hijab, dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam (QS. An Nur [24]: 31)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور / ٢٤:٣١)

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”²¹

Menurut pandangan Mufasssir Ibn Katsir dalam Surah An Nu ayat 31 terdapat Firman Allah yakni : “dan janganlah mereka menampakkan hiasan (pakaian, atau bagian tubuh) mereka kecuali yang (biasa) nampak darinya” yakni mereka tidak memperlihatkan sedikit pun hiasan yang menampilkan keindahan mereka kepada pria asing yang bukan muhrim, kecuali hiasan yang tidak dapat disembunyikan. Ibn Mas’ud (ra) memahami makna hiasan yang boleh nampak adalah pakaian yakni yang umumnya digunakan wanita-wanita Arab. Sedangkan yang terlihat dari bawah pakaian mereka, hal itu diperbolehkan karena

²¹Al Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI (Bandung: Diponegoro, 2008), 34:31.

ia tak dapat disembunyikan. Dalam hal ini yang sependapat dengan Ibn Mas'ud adalah Al-Hasan, Ibn Sirin, Abu Jawza, Ibrahim An-Nakha'i dan selain mereka. Al-A'masy meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair pendapat Ibn 'Abbas bahwa yang boleh nampak adalah wajah, kedua telapak tangan dan cincin wanita. Riwayat lain yang dinisbatkan kepada Ibn 'Abbas menyebutkan bahwa maksud dari hiasan yang boleh nampak di sini adalah pakaian yang terlihat. Malik dari Az-Zuhri meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan hiasan yang boleh nampak di sini cincin dan gelang kaki wanita.”

“Di dalam Surah An Nur ayat 31 juga terdapat Firman Allah yakni: “*dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka*’ yakni menutupi kepala mereka sampai ke dada mereka dengan kerudung. *Khimar* (kerudung) merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai penutup kepala yang menjulur ke dadanya sehingga dada dan lehernya, sehingga dengan demikian kaum wanita mukmin berbeda dengan kaum wanita Jahiliyyah yang tidak melakukan hal itu,²² bahkan mereka biasa berlalu melintas di depan kaum lelaki dalam keadaan dada-dada mereka terbuka sehingga tidak ada sedikitpun yang tersembunyi darinya. Atau boleh jadi mereka memperlihatkan leher mereka, jambul-jambul kepala, dan anting telinga mereka. Karena itu Allah SWT memerintahkan kaum mukmin untuk menutupi aurat mereka dalam bentuk dan kondisi mereka yang tersendiri, berbeda dengan wanita selain mereka. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa pernah suatu saat Aisyah (ra) berkata, “Semoga Allah merahmati kaum wanita mukmin dari kalangan Muhajiraat generasi pertama

²²Abu Bakar Muhammad Ibn 'Abdillah, Ibn Al-Arabyahkam Al Qur'an, Mesir, al-Halabi, Cet. I, 1958, Jilid III, hlm. 1567.

ketika Allah menurunkan firman-Nya, “dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka” ketika itu mereka serta-merta memotong dan kain-kain mereka lalu mereka mengenakannya (sebagai penutup kepala sampai ke dada mereka, sesuai perintah Allah SWT pada ayat tersebut). Melalui sanadnya Ibn Abi Hatim meriwayatkan bahwa Aisyah (ra) berkata, “Pada saat Allah SWT menurunkan firman-Nya, “dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka” kaum pria kembali ke rumah-rumah mereka seraya membacakan ayat tersebut kepada istri-istri mereka. Maka, tak ada seorangpun dari para istri tersebut melainkan segera mengambil kain dan memakainya, sebagai bentuk keimanan dan pembenaran mereka atas firman-Nya. Mereka lantas berada di belakang Rasulullah SAW dengan mengenakan penutup kepala seperti yang Allah SWT perintahkan tadi, seakan di atas kepala-kepala mereka bertengger burung-burung gagak.”

Pakaian atau dalam Bahasa Arab disebut *libas*, berarti sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi dan melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari panas dan dingin, seperti baju, celana, kerudung, kemeja, sarung, sorban, dan sebagainya. Jadi pakaian ialah setiap sesuatu yang menutupi tubuh.²³

Dalam Bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Jadi, busana islami artinya pakaian yang dipakai oleh umat Islam yang harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Untuk laki-laki harus menutup batas aurat yakni pusat sampai lutut sedangkan perempuan harus

²³ Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al Qur'an dan As Sunnah* (Jakarta: Almahira, 2007), hlm.3.

menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi diri sendiri.

Perhiasan muslimah, baju muslimah (muslim, wanita), berbusana atau berpakaian tentu dengan syarat-syarat yang di tentukan. Kata busana muslimah juga sebenarnya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, yang ada hanya hijab dan jilbab sebagai penutup aurat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (رواه أبو داود)²⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw. melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. (HR. Abu Daud, Hadis nomor 4098).

Al-Imam Ath-Thabari *ra* menjelaskan, “Makna hadits ini adalah kaum lelaki tidak diperbolehkan menyerupai perempuan dalam hal berpakaian dan berhias yang menjadi kekhususan wanita, begitu pula sebaliknya”

Abu Muhammad ibnu Abi Jamrah *ra* menguraikan, “Zahir (teks) lafadz hadits ini adalah kecaman keras terhadap tindakan *tasyabuh* (menyerupai) dalam segala hal. Namun, telah diketahui dari dalil-dalil lain bahwa yang dimaksud adalah (larangan) *tasyabuh* dalam hal model pakaian, gaya, dan semisalnya; bukan *tasyabuh* dalam urusan kebaikan.” Dalam hal ini terbagi menjadi tiga.

²⁴ AbuTayyib Muḥammad Syams al-Ḥaq al-Azim Abadi, *‘Aun al-Ma’bud Syarḥ Sunan Abi Daud* (Kairo: Dar al-Ḥadith, 2001), Jilid 7, hlm. 211.

- a. Pakaian khusus kaum lelaki, Seperti jubah laki laki, gamis laki laki, sarung laki laki, serban, peci/songkok, sirwal, dan semisalnya.
- b. Pakaian khusus kaum wanita, Seperti abaya, jubah wanita, gamis wanita, Jilbab, *Khimar* (kerudung), *niqab* (cadar), dan semisalnya. Ketentuan yang membedakan antara pakaian lelaki dan wanita dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *ra*, “Yang membedakan antara pakaian lelaki dan pakaian wanita kembali kepada apa yang khusus untuk kaum lelaki dan apa yang khusus untuk kaum wanita, yaitu sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kaum lelaki dan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada kaum wanita yaitu wanita diperintahkan berhijab dan tertutup, tidak boleh *tabarruj* dan menampakkan aurat.”²⁵

Beliau juga menjelaskan, “Apabila diperselisihkan tentang pakaian lelaki dan pakaian wanita, jika pakaian tersebut lebih mendekati maksud (tujuan) hijab berarti pakaian wanita. Jika sebaliknya, berarti pakaian lelaki.” Beliau menguraikan pula, “Jika pada umumnya sebuah pakaian dipakai oleh kaum pria, wanita dilarang memakainya walaupun menutupi (*satir*), seperti pakaian *faraji* (semacam syal) yang di sebagian negara biasanya dipakai oleh kaum pria bukan wanita. Larangan dari pakaian seperti ini bisa berubah dengan adanya perubahan adat kebiasaan. Adapun apabila pembedanya kembali kepada masalah *satir* (yang menutupi), wanita dianjurkan memakai pakaian yang lebih menutup.”

²⁵ AbuTayyib Muhammad Syams al-Ḥaq al-Azim Abadi, *‘Aun al-Ma’bud Syarḥ Sunan Abi Daud* (Kairo: Dar al-Ḥadith, 2001), Jilid 7, hlm. 211.

- c. Pakaian umum yang dipakai lelaki dan wanita, Ketentuannya dijelaskan Ibnu Hajar al-Asqalani *ra*, “Adapun bentuk pakaian berbeda-beda sesuai dengan adat kebiasaan setiap negeri. Bisa jadi, ada suatu kaum yang bentuk pakaian kaum wanitanya tidak jauh berbeda dengan pakaian kaum lelakinya. Hanya saja, kaum wanita (harus) dibedakan dengan hijab dan pakaian yang (lebih) tertutup.”

Dalam penerapannya, perbedaan batasan aurat antara laki-laki dan perempuan, turut serta mempengaruhi desain atau model pakaian. Bagi kaum perempuan, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan auratnya. Sebagian berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat. Sementara yang lainnya berpendapat, seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan.

Pada intinya busana muslimah harus dikaitkan dengan sikap taqwa yang menyangkut nilai psikologi terhadap pemakainya. Untuk menumbuhkan konsep dari busana muslimah semua itu kembali kepada masing-masing individu, namun dengan memperlihatkan bentuk mode pakaian, warna, keindahan, merupakan salah satu faktor pendukung yang tidak dapat dipungkiri. Perilaku dalam berbusana muslimah harus menyesuaikan dengan busana yang dikenakan. Islam mengajarkan etika tentang menutup aurat, atau busana yang terdapat dalam (QS. Al-A'raf [07]: 26)

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِى سَوْءَتِكَمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ (الأعراف / ٧:٢٦)

Artinya : Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan

pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Islam memerintahkan wanita-wanita muslim untuk memakai busana muslimah yang membedakan orang-orang muslim dan non-muslim. Islam memberikan ketetapan yang begitu jelas dalam Al-Qur'an sebagai panduan bagi seluruh kaum muslimah dalam berbusana. Sekarang ini banya sekali jenis pakaian muslim yang tidak sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Al-Qur'an. Berbusana muslimah selain menjadi sarana untuk menjaga pandangan nafsu syahwat, juga memberikan pengaruh dalam persepsi sosial dan tingkah laku seseorang untuk tetap berusaha berada dalam aturan Islam.

Hijab bagi wanita dalam Islam adalah agar wanita menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki, dan tidak memperlihatkan kecantikan ataupun tidak mengenakan perhiasan.

B. Batasan Aurat

Menurut pengertian bahasa aurat adalah *al-nuqṣaan wa alsyai' al-mustaqabbih* (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Diantara bentuk pecahan katanya adalah "awara", yang bermakna *qabīh* (tercela), yakni aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Disebut aurat karena tercela bila terlihat (ditampakkan).²⁶

²⁶Syamsudin Rama an al-nawī, *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan Wanita* (Yogyakarta: Ar-Rau oh Pustaka, 2007), hlm.36.

Tidak banyak kaum perempuan muslim yang mau benar-benar menimbulkan berbagai kemaksiatan, juga wilayah aurat perempuan itu lebih

luas dibandingkan dengan laki-laki. Sangat penting bagi seorang perempuan untuk memerhatikan aurat mereka, menutup aurat itu wajib hukumnya menutup aurat mereka, padahal aurat perempuan disamping teramat rentan.²⁷

Keempat Imam Mazhab yang terkenal, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta semua ahli fiqih berpendapat sama, bahwa aurat perempuan adalah semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Begitu juga dengan Al-Qurthubi, bahwa aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.²⁸

Maliki menyatakan: "Aurat wanita terhadap muhrimnya yang pria ialah seluruh tubuhnya, selain wajah dan ujung-ujung badan yakni: kepala, leher, dua tangan dan kaki. Hambali: "Aurat wanita terhadap muhrimnya yang pria ialah seluruh badan selain wajah, leher, kepala, dua tangan, telapak kaki dan betis. Asy-Syafi'i mengatakan wajah wanita dan juga kedua belah telapak tangannya, di hadapan pria bukan muhrim adalah tetap aurat. Sedang dibadan wanita kafir bukan aurat adalah boleh apabila seorang wanita muslimat memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya ketika bekerja di rumah, seperti Idier dan lengan tangan. Di depan wanita lajang, sama seperti wanita kafir, wajah dan telapak tangan bukan aurat.

²⁷Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab dan Tren Buka Aurat* (Yogyakarta:Mitra Pustaka, 2009), hlm.29.

²⁸*ibid*, hlm.29-30

Menutup aurat semuanya atau biasa yang disebut cadar. Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Dalam Bahasa Arab yakni *niqab*. *Niqab* bentuk jamaknya *uqūb*. Dalam kamus Al-Munawwir *niqab* berarti kain tutup muka. Dalam kamus Lisānul Arab kata **بِنْفَا** yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat. Dari arti kata cadar di atas, dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan.²⁹

Pendapat madzhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Bahkan sebagian ulama Maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.³⁰

Pendapat mazhab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki *ajnabi* (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki ajnabi. Inilah pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i.³¹

²⁹Dinda Utami Ritonga, *Kecenderungan Kepribadian Introvert pada Wanita Bercadar* (Medan:Universitas Medan Area,2016), hlm.9.

³⁰Yusuf Al-Qarawi, *Cadar Antara yang Mewajibkan dan Membid'ahkan* (Jakarta:AlKauşar,1997), hlm.29.

³¹*Ibid*, hlm.3.

Menurut Mazhab lain, Al-Imam Nawawi menyebutkan di dalam Al-Majmu', berkaitan dengan penjelasan pendapat beberapa ulama tentang aurat, bahwa aurat wanita yang merdeka adalah seluruh badannya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang sepakat dengan ini adalah Asy Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Al- u a'i, bu Šaur dan satu pendapat yang di riwayatkan Ahmad.

Menurut Abu Hanifah, As-Sauri dan Al-Mazni, kedua telapak kakinya juga tidak termasuk aurat. Menurut Ahmad, seluruh badan kecuali wajahnya saja. Ini juga merupakan pendapat Daud, sebagaimana yang disebutkan di dalam Nailul-Auṭar. Sedangkan Ibnu Hazm mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Muhalla. Segolongan sahabat dan tabi'in juga berpendapat begitu, seperti yang jelas disebutkan dalam firman-Nya, "Kecuali yang (biasa) tampak darinya."³²

C. Pengertian Qanun

Di dalam tatanan hukum Indonesia, Qanun berada pada urutan yang paling bawah sejajar dengan peraturan daerah, demikian juga dengan tatanan hukum Islam.

Kata Qanun berasal dari Bahasa Yunani, *kanon*, yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis.³³ Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi Qanun, seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmaniyah, Sultan Sulaiman I dijuluki pemberi hukum

³²*Ibid*, hlm.32.

³³<https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun>, 2016, diunduh pada 02 September 2019.

(bahasa Turki: *Kanuni*; bahasa Arab: *Al Qanuni*) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.³⁴

Literatur Melayu Aceh, Qanun sudah digunakan sejak lama, dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Salah satu naskah tersebut berjudul Qanun syara' Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Tengku Dimulek pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alauddin Mansyur Syah yang wafat pada tahun 1870 M. dalam naskah berbicara beberapa aspek di bidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili. Fungsi kepolisian dan kejaksaan, serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan. Qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam, sedangkan dalam arti luas, Qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Didalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa Qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku ditengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan didalam fiqih yang ditetapkan oleh Sultan.

Pasal 1 angka 8 ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 bahwa Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.³⁵ Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur

³⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun>, 2016, diunduh pada 02 September 2019.

³⁵Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006.

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Qanun adalah hukum material yang menghimpun ketentuan-ketentuan pidana dalam kewenangan untuk mengadili pidana-pidana tertentu dalam lingkup hukum syariat. Meski dalam perundang-undangan di Indonesia kedudukan Qanun setara dengan Peraturan Daerah, tetapi keistimewaan Qanun dianggap sebagai kewenangan yang menyebarkan secara langsung ketetapan sebuah undang-undang. Qanun adalah produk daerah yang tidak mungkin prosedur pelaksanaan dimintakan untuk diatur oleh pusat (dalam hal ini Mahkamah Agung). Selain itu Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur teknis pelaksanaan dari peraturan yang merupakan produk daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Qanun merupakan ketentuan yang berlaku disuatu daerah khususnya Aceh, yang disesuaikan dengan ketentuan didalam fiqih dan sesuai ajaran agama Islam.

D. Penjelasan Singkat Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam

Secara umum Syariat Islam meliputi aspek Aqidah, Ibadah, Muamala dan Akhlak. Setiap orang muslim di tuntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur Aqidah dan Ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan takwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak disamping ditentukan oleh kualitas iman dan takwa atau hati nurani, juga di pengaruhi adanya sanksi duniawi dan akhirat terhadap orang yang melanggarnya. Dalam sistem hukum Islam terdapat dua jenis

sanksi, yaitu sanksi yang bersifat *Ukhrawi* (yang akan diterima di akhirat kelak), dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakkan hukum menuntut peranan Negara. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh tegakkan Negara. Disisi lain suatu Negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, (shalat dan puasa ramadhan) serta Syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari Aqidah dan Ibadah. Masalah substansi telah diatur oleh *nash* dan telah dikembangkan parah Ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

Dengan demikian upaya legeslasi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara dan melindungi Aqidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai paham dan atau aliran sesat. Pelanggaran Aqidah yang diancam hukuman di dalam Qanun ini, hanyalah setiap orang yang menyebarkan paham atau aliran sesat. Sedangkan ancaman Hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja keluar dari Akidah Islam dan atau menghinaatau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya akan diatur dalam Qanun tersendiri tentang Hudud.

Demikian pula dengan peraturan Aspek Ibadah, baik Shalat Fardu/Jum'at maupun Puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas Iman dan kualitas Amal, serta intensitas Ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan

Kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu juga didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan Syi'ar Islam namun Nash dalam lingkup nilai Ibadah.

a) Aqidah

Menurut bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yang berakar dari kata *aqada*-*ya'qidu*-*'aqdan*-*'aqidatan*. *'Aqdan* berarti simpulan, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi *aqidah*, berarti keyakinan. Menurut Haroen, *aqidah* yang berasal dari *aqada* berarti mengikat, menyimpulkan, mengokohkan atau menjanjikan. Menurut Yunahar Ilyas, Relevansi antar arti kata *'aqdan* dan *aqidah* adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Sementara itu, menurut Junaidi, *aqidah* adalah jama' dari *aqā'id* yang artinya keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap dan pandangan hidupnya. Dalam Kamus Al-Qur'an *aqidah* diartikan sebagai keyakinan atau kepercayaan yang mengikat (mempertalikan) antar jiwa makhluk yang diciptakan dengan *Al-Khaliq* (yang menciptakan).³⁶

Jadi, *aqidah* merupakan keyakinan yang dianut oleh setiap manusia terhadap suatu hal, yang menjadi dasar aktivitas dan pandangan hidupnya. Setiap manusia memiliki *aqidah*, baik dalam bentuk *Monoteisme* (kepercayaan kepada satu Tuhan), *politeisme* (kepercayaan pada banyak Tuhan), maupun paham lainnya, yang bermuara pada keyakinan yang kokoh dan tidak tergoyahkan.

³⁶Nurzannah, Akrim, dan Mahmud Yunus Daulay, *Akidah dan Akhlak* (Medan: UMSU PRESS, 2017), hlm. 3-4.

Setiap manusia telah memiliki aqidah sebelum lahir ke dunia ini karena telah melakukan syahadah (kesaksian/perjanjian) pada usia 120 hari dalam kandungan ibunya bahwa Allah SWT adalah Tuhan.

Setelah lahir ke dunia, manusia mengalami banyak benturan dan gangguan yang terkait dengan kesaksian tersebut. Mereka terkontaminasi oleh kondisi orangtua, lingkungan, dan kepribadiannya sehingga merusak perjanjian tersebut.³⁷

b) Ibadah

Ibadah berasal dari bahasa Arab, akar katanya ‘abada-ya’budu-‘ibadatan artinya menyembah atau menghambakan diri. Pengertian Ibadah secara Syari’ah sebagai mana yang telah dirumuskan oleh Syeikh Ibnu Taimiyah ialah: “Segala sesuatu yang disukai dan diridhai Allah Swt. Baik berupa perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin”.

Menurut definisi (*ta’rif*) di atas, ibadah itu meliputi seluruh aktivitas manusia baik berupa lahir yang dilakukan oleh badan manusia, tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya dan sebagainya, maupun perkataan yang diucapkan oleh lidah/lisan ataupun dengan isyarat yang lain. Begitu juga aktivitas batin manusia, baik yang dilakukan oleh otak, berupa berpikir, mengingat, menilai, merancang ataupun yang dilakukan oleh hati seperti berniat, mencintai, menyangi dan sebagainya.³⁸

³⁷*Ibid*, hlm. 5.

³⁸ Lahmuddin, Ismet Junus Dkk, *Pendidikan Agama Islam* (Medan: Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area Pusat Islam, 2014), hlm. 99-100.

Menurut penulis, Ibadah merupakan tugas manusia didunia kepada Allah SWT, dengan cara melakukan segala apa-apa yang diperintahkan, disukai dan diridhai oleh Allah SWT.

Ibadah ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ibadah bila dipandang dari segi nilai dan tujuannya ada yang bersifat *Syakhshiyah*, *Ijtima'iyah*, dan *Siyasah*. Ibadah khusus atau ibadah memiliki beberapa prinsip, sehingga dalam melaksanakan ibadah tersebut tidak menyalahi prinsip tersebut di antaranya; AlMa'bud yakni yang disembah atau diibadahi hanya Allah SWT. Al-Ikhlas yakni beribadah kepada Allah SWT. Harus dengan berlandaskan ketulusan dan keikhlasan, harus sesuai dengan tuntunan hadist Rasulullah SAW, dikerjakan pada waktu yang telah ditetapkan, dilakukan harus langsung dan tanpa perantara.

c) Syi'ar Islam

Syi'ar berasal dari kata *Syu'ur* yang bermakna rasa, karena Syi'ar dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan keagungan Allah SWT. Menurut Al-Razi, Sy'iar tak hanya menunjuk amalan haji semata, tetapi semua ibadah, bahkan semua aktifitas yang menjadi simbol kepatuhan seseorang kepada Allah.

Seperti telah dikemukakan bahwa Syi'ar bertalian dengan takwa. Ahli tafsir Zamahsyari, juga Ibnu 'Asyur, memahami takwa sebagai Mabda', atau pangkalan tolak kegiatan Syi'ar. Bagi Al-Alusi, selain sebagai Mabda', juga sebagai ta'lil, yakni alasan perlunya Syi'ar.

E. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah (WH) sudah ada pada masa Rasulullah, meskipun belum terbentuk secara sempurna, pada masa itu Rasulullah sendiri yang memutuskan perkara yang ada, dan kemudian pada masa Umayyah lah mulai ada pemisahan antara lembaga dan Khalifah. Menurut Hassan Ibrahim, yang dikuatkan oleh Muhammad Salam Madzkur dalam bukunya *Al-Qadhafi Al-Islam* bahwa Wilayatul Hisbah sebagai suatu lembaga dengan *Muhtasib* (lembaga yang melaksanakan hisbah), yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasyiah (158-169 H/775-786 M). Pada masa pemerintahan Abbasyiah, kelembagaan *Hisbah* pada periode Umayyah, namun kewenangan mengangkat *Muhtasib* (lembaga yang melaksanakan hisbah) sudah tidak lagi dalam kekuasaan khalifah, tetapi diserahkan kepada *Qhadi Al-Qudhah*,³⁹ baik mengangkat maupun memberhentikannya.

Hisbah adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.⁴⁰

Wilayatul Hisbah adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran ringan yang berorientasi pada suatu

³⁹Mawadda, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat* (Medan: Universitas Islam Negeri SU Fakultas Ushuluddin, 2015) hlm. 70.

⁴⁰ Muhammad Mubarak, *al-Dawlah wa Nizam al-Hisbah 'inda Ibn Taymiyyah*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), dalam Sa'd 'Abdullah Sa'd al-'Arifi, *al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jina'iyah*. hlm. 25.

tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan *'amar ma'ruf nahi munkar*, menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan buruk. Tugas ini merupakan suatu kewajiban fardhu yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang berkuasa. Karenanya, penguasa mengangkat pejabat Lembaga ini dari orang-orang yang dipandang cakap, jujur, dan mempunyai disiplin, serta tanggung jawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas al-hisbah bukan dari kalangan yang mudah disuap dengan menghalalkan segala cara.

Wilayatul Hisbah (WH) bukan institusi baru yang diperkenalkan di Aceh. Di masa kesultanan Iskandar Muda, Wilayatul Hisbah sudah ada namun pada saat itu tidak dibentuk sebuah lembaga khusus untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan berbuat buruk). Karena perannya sudah memadai yang dilakukan oleh para Ulama, Imam Gampong, Geuchik (Kepala Desa), dan para orang tua yang disegani, dibarengi pula oleh rakyat Aceh yang memiliki kesadaran religius yang tinggi, sehingga keberadaan sebuah institusi pemerintahan yang tugasnya memantau pelaksanaan Syari'at Islam belum dirasa perlu. Setiap individu dengan kesadaran masing-masing menjadi *muhtasib* (lembaga yang melaksanakan hisbah), menegur dan mengingatkan saudaranya sekiranya melakukan perkara yang bertentangan dengan Syari'at dan selalu mengajak saudaranya melakukan perbuatan *ma'ruf* yang dianjurkan Syari'at Islam.

Di Aceh lembaga Wilayatul Hisbah dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004 tentang

organisasi dan pembentukan Wilayatul Hisbah.⁴¹ Dalam Bab I (ketentuan umum) angka 7, surat keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tersebut menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk pembinaan, pengawasan dan melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang Syari'at Islam dalam rangka melaksanakan *Amar ma'ruf nahi munkar*. Kemudian dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam menentukan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan pengawasan pelaksanaan '*amar ma'ruf nahi munkar*' dan bertugas sebagai polisi khusus.⁴²

Di Kota Langsa sendiri Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Dinas Syari'at Islam, dan dipimpin oleh Bapak Drs. H. Ibrahim Latif, MM. Wilayatul Hisbah ditugaskan untuk menerapkan dan mensosialisasikan Qanun yang telah ditetapkan. Selain itu tugas Wilayatul Hisbah adalah merazia masyarakat yang melanggar Qanun yang telah ditetapkan.

F. Sektor Wisata

Kegiatan ekowisata di Indonesia diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No: 33 Tahun 2009 yang mana secara umum objek kegiatan ekowisata tidak jauh berbeda dari kegiatan wisata alam biasa, namun memiliki nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang tinggi terhadap objek wisatanya. Kota Langsa

⁴¹keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 01 Tahun 2004.

⁴²Mawadda, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat* (Medan: Universitas Islam Negeri SU Fakultas Ushuluddin, 2015) hlm. 4-5.

memiliki beberapa tempat wisata yang dikelola pemerintah untuk menarik perhatian pengunjung yang datang ke Kota Langsa. Tempat wisata yang ada di Kota Langsa yakni :

- a) Lapangan Merdeka Kota Langsa, terletak di pusat Kota Langsa. Lapangan ini biasa dipakai untuk acara-acara dan kegiatan sosial. Dan lapangan merupakan Ruang Terbuka Hijau utama Kota Langsa. Setiap hari ramai warga menghabiskan waktu di tempat ini.
- b) Taman Bambu Runcing, terletak tak berjauhan dari Lapangan Merdeka Kota Langsa. Taman dengan konsep *central park* atau "taman di tengah kota" ini ramai dikunjungi karena ada nilai sejarah kemerdekaan di sini. Karakteristik utama taman ini adalah, adanya Tugu Bambu Runcing yang berdiri megah di tengah taman.
- c) Taman Hutan Kota Langsa, dikenal juga dengan sebutan Hutan Lindung Kota Langsa, berlokasi di Jalan Perumnas, Desa Paya Bujok Seulemak, Langsa Baro. Taman hutan ini adalah kawasan wisata dengan konsep Ruang Terbuka Hijau yang juga berfungsi sebagai paru-paru Kota Langsa. Memiliki luas sekitar 10 Ha. Pengunjung bisa merasakan sejuknya suasana alam serta melihat keindahan dan keasrian flora serta fauna di taman hutan ini. Di taman hutan ini terdapat sekitar 300 jenis tanaman dan puluhan binatang. Pohon damar dan pohon merbau merupakan salah satu tumbuhan yang bisa dilihat di sini. Bila beruntung, pengunjung juga bisa menyaksikan bunga bangkai yang sedang mekar. Tapi ini hanya terjadi setahun sekali, biasanya pada November atau Desember. Itupun hanya

berlangsung sekitar 4 (empat) hari. Koleksi binatangnya juga lumayan banyak. Ada buaya, rusa, ular, musang, kera, landak, dan aneka jenis burung. Kegiatan yang paling digemari, terutama bagi anak-anak yaitu memberi makan rusa. Cukup membeli makanannya berupa wortel yang sudah dirajang, pengunjung pun bisa memberi makan rusa-rusa tersebut.

- d) Hutan Mangrove Kota Langsa, kawasan Hutan Mangrove yang terletak di kilometer 10 Kuala Langsa, adalah tempat favorit untuk menikmati wisata alam mangrove bersama keluarga. Hutan Mangrove ini sangat indah, rimbunan pohon bakau atau mangrove terbentang luas di atas lahan rawa pesisir Kuala Langsa ini. Aneka ragam pohon mangrove di hutan mangrove ini adalah salah satu yang terlengkap di dunia. Ada jalan setapak di dalam hutan mangrove sehingga pengunjung bisa masuk ke dalam hutan mangrove dengan sangat nyaman. Pengunjung bisa merasakan sensasi dan sejuknya suasana hutan mangrove yang mungkin tidak bisa didapatkan di kota lain di Aceh. Dan kawasan hutan mangrove ini mendapatkan penghargaan ajang pesona Indonesia (API) tahun 2019 yang diselenggarakan pada 24 November 2019, mengalahkan tempat wisata lainnya yang ada di Indonesia.
- e) Jalan Cut Nyak Dhien, jalanan ini merupakan sentra wisata kuliner Kota Langsa. Ada banyak sajian makanan yang ditawarkan di sini, menjelang sore dan malam hari. Menu istimewa adalah, Mie Aceh, sate daging, martabak, es krim, aneka makanan tradisional, aneka *western food* seperti burger dan pizza, serta jajanan lainnya dengan harga yang sangat

terjangkau. Khusus untuk kuliner asli Kota Langsa yaitu Sop Sumsum tidak terdapat di tempat ini, Sop Sumsum hanya bisa dinikmati di restoran-restoran yang ada di Kota Langsa.

- f) Gedung Balee Juang, gedung ini diresmikan menjadi Museum Kota Langsa oleh Wali kota Langsa Tgk. Usman Abdullah, SE pada tanggal 22 Januari 2019. Balee Juang adalah gedung peninggalan kolonial Belanda. Arsitektur ala Belanda masih sangat jelas terdapat pada gedung ini. Gedung ini telah ada sejak tahun 1920, yang ketika itu bernama *Het Kantoorgebouw Der Atjehsche Handel-Maatschappij Te Langsar*, gedung semacam ini hanya ada di Aceh saja ketika itu yaitu di Kuta Raja dan di Kota Langsa.
- g) Pelabuhan Kuala Langsa, merupakan pelabuhan internasional yang menghubungkan Kota Langsa dengan luar negeri dan juga aktif dengan kegiatan Ekspor Impor. Pada hari Sabtu 23 Februari 2013, pelayaran perdana Kota Langsa - Penang, Malaysia kembali diresmikan setelah sempat vakum pada masa konflik dahulu. Pelabuhan ini juga menarik untuk para wisatawan, di sini wisatawan bisa memancing, berenang, bersantai dengan keluarga dan melihat perahu-perahu nelayan yang lalu lalang. Di pelabuhan ini juga banyak dijumpai pedagang yang menjual aneka makanan dan minuman, seperti bakso, jagung rebus, es krim, mie Aceh, es kelapa muda dan lain sebagainya. Para penjualnya sebagian besar berasal dari desa setempat.

- h) Ujong Pusong, atau desa Pusong adalah pedesaan unik dan langka di mana penduduk sehari-hari yang mayoritas pekerjaannya nelayan. Nuansa desa Pusong sangat unik mengingat Pusong ini terletak di tengah laut yang berbentuk daratan pantai. Ujong Pusong adalah salah satu tempat kunjungan wisata yang masih terus dikembangkan, melihat penduduknya yang religius dan bersahabat didukung oleh adanya beberapa sarana dan prasarana seperti masjid dan air bersih.
- i) Pulau Teulaga Tujoh, adalah pulau kecil yang berada tak jauh dari Pusong. Tempat ini sangat indah dan unik serta langka karena tidak ada satu pun orang yang bermukim di sini karena beberapa sebab. Salah satunya adalah karena tempat ini diyakini masyarakat adalah tempat keramat. Pulau Teulaga Tujoh adalah pulau yang belum tersentuh dan masih alami dengan pantai, hutan yang hijau dan dengan hunian binatang di antaranya kera dan burung yang ramah menyambut kedatangan pengunjung. Pulau ini sangat cocok menjadi tempat penelitian dan rekreasi alam.
- j) Kawasan Toko Belakang, merupakan kawasan orang Tionghoa atau biasa disebut dalam bahasa Inggris, China Town. Kawasan ini dulunya merupakan kawasan komunitas warga Tionghoa yang besar. Sampai sekarang beberapa bangunan asli milik warga Tionghoa masih bisa dilihat, namun seiring perkembangan zaman, sebagian bangunan ini dihancurkan dan dibangun bangunan yang lebih modern. Ada beberapa makanan khas China di tempat ini, seperti kwetiau, pangsit, cap cay, dan lain-lain. Terdapat juga satu bangunan pabrik kecap asin tertua di tempat ini.

Langsa Town Square (Latos), merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Kota Langsa. Latos terletak di pusat pasar Kota Langsa. Gedung Latos terdiri dari 3 lantai dengan 400 unit toko, dan memiliki beragam fasilitas menarik.⁴³

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan data yang akurat dan dapat digunakan serta diolah menjadi suatu informasi untuk mendukung penulisan Tugas Akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memerlukan cara yang tepat untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data tersebut. Dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Metode yang secara pengertiannya adalah cara bertindak menurut sistem dan aturan tertentu. Maksud dari metode adalah supaya kegiatan praktis terlaksana dengan rasional dan terarah serta mencapai hasil yang optimal.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif–empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan

⁴³<http://www.langsakota.go.id>, diunduh pada tanggal 28 November 2019, pukul 20:00 WIB.

berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif–empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung.⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Hal ini dilakukan dalam upaya lebi memahami data dan fenomena obyek yang ada di lingkungan sekitar dalam hal persepsi busana muslimah dan gaya berpakaian yang di ambil melalui studi kasus pada penerapan Qanun yang ditetapkan Pemerintah terhadap masyarakat serta wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Langsa.

Menurut Prof. Dr. Conny R. Semiawan manfaat penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan suatu kasus secara mendalam tentang orang maupun lingkungan sekitar kasus berdasarkan keadaan nyata dilapangan, dapat menyajikan lebih dari satu sudut pandang dan informasi karena hasil penelitian tidak diasumsikan oleh peneliti di awal penelitian, tetapi diperoleh dari partisipan dan dianalisis oleh peneliti.⁴⁵

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney dalam Moh Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi

⁴⁴Dr, Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 145.

⁴⁵Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Grasindo,2010), hlm.45.

tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁴⁶

C. Lokasi Penelitian

Kota Langsa adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Terletak di wilayah timur Provinsi Aceh, Kota Langsa berada kurang lebih 430 km dari kota Banda Aceh. Berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2001 Kota Langsa memiliki luas 262,41Km².⁴⁷ Kota Langsa memiliki 5 (lima) Kecamatan serta 66 desa. Jumlah penduduk Kota Langsa sebanyak 157.001 orang.

Kondisi perikanan Kota Langsa cukup potensial dikembangkan, Selain udang windu dibudidayakan pula udang putih dan udang api-api. Langsa juga membudidayakan ikan jenis ekonomis tinggi seperti ikan kerapu yang pada tahun 2001 mencapai 90.000 benih. Benih-benih ini dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ikan kerapu ke Singapura dan Malaysia, Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan paling banyak dari Medan, Sumut.

1. Agama

Mayoritas penduduk Kota Langsa adalah suku Aceh, suku Melayu, suku Jawa, suku Tionghoa, dan suku Batak. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, namun bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama. Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kota Langsa dan rakyat

⁴⁶Moch. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.16

⁴⁷Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002.

Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dasar dalam kehidupan masyarakat Kota Langsa.

Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Buddha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghoa (China). Kota Langsa merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kota Langsa sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatra Utara, sehingga menempatkan Kota Langsa sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.⁴⁸ Kota Langsa memiliki tempat ibadah untuk agama Islam yang paling banyak, tidak hanya itu Kota Langsa juga memiliki tempat ibadah untuk agama lain, diantaranya :

- a) Masjid Raya Darul Falah Kota Langsa, masjid terbesar yang berlokasi di jantung kota dengan fasilitas besar yang dapat menampung jamaah untuk melakukan ibadah. Terdapat banyak masjid yang tersebar di penjuru desa yang ada di Kota Langsa. Mayoritas penduduk di Kota Langsa beragama Islam, tidak sulit untuk menemukan masjid khususnya di Kota Langsa umumnya di Aceh. Masjid tertua yang dimiliki Kota Langsa adalah Masjid Istiqamah, yang berdiri kukuh di kecamatan Langsa Kota tepatnya di desa Gampong Teungoh.
- b) Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), berlokasi dipusat Kota Langsa yang berjarak tidak jauh dari Lapangan Merdeka Kota Langsa.

⁴⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa, diunduh pada tanggal 28 November 2019, pukul 21:15 WIB.

- c) Vihara Buddha Kota Langsa, berlokasi di pusat pasar tradisional Kota Langsa, vihara ini sangat indah dengan balutan cat warna merah yang mencirikan warna khas komunitas Tionghoa.

2. Pendidikan

Hakikat pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian, baik di luar maupun dalam sekolah yang berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, masyarakat sudah menganggap pendidikan sebagai suatu kebutuhan. Investasi pemerintah di bidang pendidikan sangat berguna sebagai salah satu cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan memerangi kemiskinan.

Pendidikan masyarakat yang semakin baik merupakan modal dalam memperebutkan kesempatan kerja sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan mereka. Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang sangat strategis pendidikannya dan memiliki banyak sekolah Negeri maupun swasta.

Tabel II
Sekolah di Kota Langsa

No	Kecamatan	SD Sederajat	SMP Sederajat	SMA Sederajat	SMK Sederajat
1.	Langsa Timur	10	5	4	1
2.	Langsa Barat	16	6	4	-
3.	Langsa Kota	23	6	5	5
4.	Langsa Lama	10	3	1	-
5.	Langsa Baro	18	9	5	4

Sumber : data referensi pendidikan Kota Langsa

Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang sangat murah untuk mengenai biaya hidup, serta Kota Langsa memiliki beberapa perguruan tinggi yang mengundang orang luar daerah untuk menuntut ilmu di Kota Langsa dengan biaya yang strategis. Kota Langsa memiliki 2 (dua) perguruan tinggi Negeri yakni :

- a) Universitas Samudra Langsa
- b) Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala

Tidak hanya perguruan tinggi negeri, Kota Langsa memiliki perguruan atau akademi swasta yang banyak mengundang masyarakat luar untuk datang bukan hanya sekedar mengunjungi melainkan untuk menempuh pendidikan. Perguruan dan akademi swasta tersebut yaitu :

- a) Universitas Sains Cut Nyak Dhien
- b) Kampus LP3I
- c) STIM Pase Langsa
- d) Akademi Kebidanan Harapan Ibu
- e) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cut Nyak Dhien
- f) Akademi Keperawatan UMMI
- g) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bustanul Ulum Langsa
- h) Akademi Kebidanan Bustanul Ulum
- i) Akademi Keperawatan Depkes (Departemen Kesehatan)

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan *field research* yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis terjun langsung kelapangan pada objek penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dilakukan teknik lapangan menggunakan berbagai cara dan pendekatan yang sesuai. Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.⁴⁹ Didalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, dan kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki, teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan

⁴⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan* (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), hlm. 45.

Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data-data yang konkrit dari sumbernya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dokumen yang dimaksud adalah sebagai data penelitian, dan tidak semua isi dokumen dimasukkan ke dalam penelitian ini, akan tetapi di ambil pokok – pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data pendukung saja.

E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisa data, penulisan menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa katakata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Qanun No 11 Tahun 2002

Pada mulanya setiap peraturan hukum yang telah dibuat pemerintah sebagai pengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat, bahkan manusia dengan dirinya sendiri.

Hal ini tanpa mempermasalahkan bentuk dan sifat dari peraturan hukum tersebut, apakah berbentuk undang-undang, konvensi, peraturan daerah (Qanun), adat dan sebagainya. Peraturan hukum di samping mengatur tata kehidupan dalam masyarakat juga mengatasi kebebasan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Indonesia sebagai Negara hukum dalam sejarah penerapan hukumnya mengenal 3 (tiga) sumber hukum yaitu sumber hukum yang berasal dari Barat, hukum Islam dan hukum adat. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia ternyata tidak saja berlaku secara yuridis formal, yakni mengubah hukum positif berdasarkan ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, namun juga yang berlaku secara normatif seperti hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, kedua norma tersebut telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) di dalam masyarakat. Hal ini mengingat bukan saja karena hukum Islam merupakan *entitas* agama yang dianut oleh mayoritas penduduk hingga saat ini, akan tetapi dalam dimensi amaliahnya di beberapa daerah telah menjadi bagian tradisi masyarakat yang terkadang dianggap sakral seperti di Sumatera Barat dikenal dengan adanya istilah “Adat bersendi syara. Syara bersendi kitabullah.” Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum serta tetap hidup di masyarakat Indonesia, telah mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi politik yang ada. Syariat Islam telah menjadi sejarah yang panjang.⁵⁰

⁵⁰Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Vol. XVI, No.2 (Juli, 2016), hlm.151.

Qanun Provinsi Aceh No 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam dalam bidang akidah, ibadah, dan syi'ar Islam khususnya dalam Bab V pelanggaran syi'ar Islam Pasal 13 tentang busana Islami, diharapkan dapat mengikuti ajaran agama Islam dalam hal berbusana khususnya bagi wanita. Dengan tujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mendekati perbuatan pemerkosaan apabila seorang wanita memakai busana tidak mengikuti ajaran Islam, maka akan mengundang syahwat laki-laki dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan terhadap wanita tersebut. Selain itu dengan diterapkan Qanun ini untuk mengurangi angka pelecehan seksual terhadap wanita.

Pemahaman norma-norma hukum merupakan petunjuk adanya kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada sekedar berpengetahuan tentang hukum.⁵¹ Semakin tinggi pemahaman atas norma-norma hukum semakin tinggi kesadaran hukum yang terjadi. Ketika peneliti melihat proses dan cara Dinas Syariat Islam Kota Langsa melakukan razia busana muslim, peneliti mendapati banyak masyarakat yang masih belum memahami pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2002 mengenai busana.

Qanun yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun ini ternyata masih ada yang belum mengetahuinya. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai ketidakpedulian masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam atau dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Untuk mengetahui ini maka

⁵¹Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 109.

observasi terhadap pelaksanaan razia muslim oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa penting dicermati.

Di dalam melakukan kegiatan razia busana di Kota Langsa, Dinas Syariat Kota Langsa sebelumnya telah melakukan jadwal tetap untuk menentukan hari dan tempat pelaksanaan razia busana. Hari-hari dan tempat-tempat yang terpilih biasanya dirahasiakan oleh petugas razia agar jangan sampai informasinya diketahui oleh masyarakat luar. Tetapi dari pengamatan peneliti pola dan jadwal razia busana muslim di Kota Langsa telah diketahui masyarakat. Hari dan tempat tersebut hampir tidak pernah berubah. Dinas Syari'at Islam Kota Langsa melakukan razia busana muslim pada hari Senin, Selasa dan Kamis, serta hampir setiap hari-hari itu saja mereka melakukan razia di jalanan. Untuk tempat-tempatnya sendiri Dinas Syari'at Islam Kota Langsa melakukannya secara acak, tetapi terlalu sering mereka melakukannya ditempat yang sama yakni, di depan Kantor Pajak Kota Langsa, di depan Masjid Baiturrahman Paya Bujok Seuleumak, dan didepan Kantor Dinas Syari'at Islam sendiri. Serta untuk pembagian hari dan tempat mereka memilih dengan acak tidak sesuai jadwal. Razia busana Islami ini biasanya dilaksanakan sehabis shalat ashar atau sekitar pukul 16:30 WIB.⁵²

Untuk tempat razia, didasarkan atas tempat biasanya masyarakat Kota Langsa sering melakukan aktivitas. Yang menjadi pilihan tempat masyarakat sering menghabiskan waktu di sore hari bersama teman-teman dan keluarga atau sekedar

⁵²Hasil wawancara dengan Bapak Azhar, S.SOS.I, selaku KASI Hubungan Masyarakat Dinas Syari'at Kota Langsa.

berpergian. Lokasi Jalan Ahmad Yani menjadi pilihan utama, karena selain sebagai jalan utama, jalan Ahmad Yani juga merupakan pusat kegiatan para remaja dan perempuan untuk beraktivitas dan bersosial bersama yang lain. Selain Jalan Ahmad Yani, pilihan Kuala Langsa sebagai lokasi razia dikarenakan lokasi ini sering dijadikan lokasi wisata oleh remaja dan para masyarakat dewasa. Walaupun tujuan utama lokasi Kuala Langsa menjadi lokasi razia karena Polisi Wilayatul Hisbah dapat juga menjaring pelaku khalwat.

Jangka waktu jam razia busana Islami sebenarnya tidak efisien. Jam-jam razia yang dilakukan pada pukul 16:30 WIB sampai pukul 18:00 WIB, terlalu sempit untuk mengawasi seluruh masyarakat. Disaat peneliti ikut serta di dalam razia busana muslim yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa, peneliti melihat petugas razia akan membiarkan para masyarakat yang melanggar aturan busana muslim ketika berada diluar jam razia. Hal ini peneliti dapati disemua pelaksanaan razia busana muslim yang peneliti ikuti. Setelah peneliti bertanya kepada petugas razia, dikatakan bahwasanya untuk jam-jam yang diperbolehkan melakukan razia busana muslim itu memang harus seperti itu, karena tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah hanya sebagai pembinaan dan sosialisasi. *“apabila kami melakukan razia diluar jam razia nanti akan susah dikami juga, nanti masyarakat protes-protes bilang kami bekerja gak sesuai prosedur, karena melakukan razia pada hari itu-itu saja, jadi mereka menganggap kami melakukan razia sesuai prosedur”*.⁵³

⁵³Hasil wawancara dengan Bapak Azhar, S.SOS.I, selaku KASI Hubungan Masyarakat Dinas Syari'at Kota Langsa.

Jadi dari penjelasan tersebut peneliti mendapati suatu pengertian bahwasannya di dalam melakukan razia, Dinas Syariat Islam Kota Langsa tidak bisa melakukan razia pada sembarang waktu yang mereka inginkan. Mereka tidak memiliki wewenang seperti petugas polisi yang dapat menangkap tangan ditempat masyarakat yang kedapatan melakukan tindak pidana yang melanggar aturan. Sayangnya, melihat razia busana muslim yang diberikan masa waktu ini dengan semangat penerapan syariat Islam. Dalam pandangan peneliti hal ini memberikan gambaran bahwa razia busana muslim di Kota Langsa memiliki waktu-waktu tertentu yang harus disesuaikan dengan jam kerja pegawai.

Selain dari pada hal tersebut peneliti melihat dilapangan adanya kesenjangan pada masyarakat yang dirazia. Dimana peneliti melihat petugas Wilayatul Hisbah tidak merazia para kaum pria yang menggunakan celana pendek yang panjangnya tidak melewati lutut. Disini sangat terlihat ketimpangan gender yang terjadi.

Seharusnya berdasarkan Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 sudah sangat jelas bahwasannya yang dirazia itu ialah masyarakat yang berada di Aceh yang tidak menggunakan pakaian sesuai syariat Islam, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, dalam pelaksanaan hal ini sangat berbeda dengan peraturan yang tercantum.

Wilayatul Hisbah merupakan salah satu lembaga yang dibawah naungan Dinas Syari'at Islam, memiliki tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor: 139 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan

dan pembangunan di bidang penegakan Peraturan daerah atau Qanun, Perlindungan Masyarakat, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program penegakan perundangundangan daerah dan syariat Islam.
- b. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Penyelidikan dan intelijen untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dibidang perundang-undangan daerah dan syariat Islam.
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyidikan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundangundangan daerah dan syariat Islam.
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah dan Syariat Islam.
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- g. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil Aceh dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten dan kota.

- h. Pelaksanaan kegiatan pembekalan, pendidikan dan pelatihan teknis bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil Aceh dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten dan kota.
- i. Pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terhadap untuk melahirkan kepastian hukum
- j. Pelaksanaan kerjasama penegakan qanun dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten dan kota.
- k. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap personil yang melanggar aturan kedinasan, peraturan perundangundangan daerah dan syariat Islam.
- l. pelaksanaan penyelenggaraan tindakan terhadap personil yang melanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁵⁴

Saat melakukan konfirmasi mengenai hal tersebut ke salah satu petugas Wilayatul Hisbah, jawaban yang diberikan ialah karena perempuan menjadi fokus pelaksanaan razia busana Islami. Selain itu faktor laki-laki susah untuk dirazia karena rata-rata suka melawan dan kabur dengan sepeda motornya, menjadi alasan berikutnya, petugas Wilayatul Hisbah takut kalau dikejar nanti dia jatuh dari kereta dan pihak petugas akan disalahkan.⁵⁵

⁵⁴Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh.

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Kiki pegawai negeri sipil Dinas Syari'at Islam yang berada dilapangan pada saat razia.

Proses penerapan razia busana muslim menjadi teknologi kekuasaan penting yang dapat mendorong dan mengarahkan masyarakat agar lebih sadar akan syariat Islam.⁵⁶Memakai kerangka Foucault, teknologi kekuasaan yang digunakan berupaya memberi hukuman kepada pelanggar yang melawan otoritas kekuasaan. Untuk itu, pendisiplinan melalui penundukan tubuh melalui aktivitas pengawasan secara berkala menjadi alta kekuasaan efektif.⁵⁷Otoritas mengenai moral dan agama yang sebelumnya dipegang oleh pemuka agama atau dalam hal ini ulama, telah berpindah kepada pemerintah. Hal ini dalam analisa penulis karena adanya dualisme otoritas mengenai penegakan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam yang kini berpindah kepada pemerintah memerlukan tahapan birokrasi dan administrasi yang terstruktur. Oleh sebab itu kekuasaan atas penindakannya haruslah diterapkan secara merata di segala tatarannya. Ketika pengaturan moral berpakaian masuk kedalam bentuk legal (Qanun) maka pemerintah wajib untuk ikut campur dalam menertibkannya. Kewajiban yang tertera di dalam Qanun, berubah menjadi hak untuk pemerintah ikut campur dalam pengaturan moral berpakaian masyarakat Aceh. Oleh karena itu pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002 penerapan razia busana Muslim berlaku general bagi masyarakat Aceh maupun non-Aceh, dan dibawah pengawasan pemerintahan. Petikan wawancara peneliti dengan petugas razia dibawah ini memberikan sedikit gambaran mengenai hal tersebut. *“Tidak ada alasan, bukan orang Aceh atau cuma main ke Aceh yang harus berjilbab. Yang terpenting asalkan ia sudah menginjakkan kaki di bumi Aceh ia harus menaati peraturan ini. Untuk Non muslim kami hanya meminta*

⁵⁶Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*(Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 288.

⁵⁷Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*(New York: Vintage Books, 1977), hlm. 25.

kepada mereka untuk berpakaian yang sopan selagi di Kota Langsa ini. Bagi yang melanggar tidak ada bedanya sama yang lain, tetap di razia dan dinasihati oleh petugas Wilayatul Hisbah. Anak-anak remaja perempuan juga sama, kita panggil orang tuanya”⁵⁸

Penerapan syariat Islam, khususnya mengenai busana muslim sangat birokratis dan penuh dengan administrasi. Waktu dan tempat razia tidak bisa dilakukan di sembarang tempat dan waktu, karena akan melanggar ketentuan dari struktur lembaga. Bentuk razia dan hukuman juga tidak bisa dilakukan selain diluar yang ditentukan. Seperti yang telah disebutkan, Dinas Syariat Islam maupun Polisi Wilayatul Hisbah hanya berwenang untuk mengawasi dan memberikan pendidikan mengenai pelaksanaan syariat Islam. Perihal hukuman dan pembuatan aturan tidak menjadi wewenang. Oleh sebab itu proses pelaksanaan syariat Islam busana muslim harus berada dalam koridor tersebut.

1. Waktu dan Tempat Razia

Proses penerapan razia busana muslim di Kota Langsa tidak dilakukan setiap waktu. Razia dilakukan dalam hari-hari tertentu saja. Hari razia ditentukan oleh kepala Dinas Syariat Islam dan biasanya ditentukan bersifat rahasia dan tempo instruksi yang singkat. Petugas lapangan dalam hal ini Polisi Wilayatul Hisbah baru mendapatkan instruksi untuk melaksanakan razia di siang hari. Hal ini dikarenakan menjaga agar pelaksanaan razia tidak sampai terdengar ke masyarakat. Ritme razia tidak benar-benar rahasia dan tertutup. Hal ini karena hari-

⁵⁸Hasil wawancara dengan Bapak Azhar, S.SOS.I, selaku KASI Hubungan Masyarakat Dinas Syari’at Kota Langsa.

hari pelaksanaan razia hampir tidak pernah berubah. Biasanya dalam seminggu razia busana Islami dilakukan 2 (dua) kali. Kadang kala razia dilakukan seminggu 4 (empat) kali, yakni pada hari minggu, tetapi ini sangat jarang dilakukan. Pelaksanaan razia ini tergantung dengan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan razia. Biasanya hari Senin, Selasa, dan Kamis menjadi hari-hari yang sering dilakukan razia. Ketika razia dilakukan di hari Senin di depan Masjid Paya Bujok Seulemak maka di hari Selasa razia pindah didepan kantor Dinas Syari'at Islam. Semua pelaksanaan waktu dan tempat razia tergantung intruksi dari Kepala Dinas Syari'at Islam.

Pemberlakuan waktu razia busana Muslim disini peneliti mengambil konsep *panopticon* yang dikemukakan Foucault. *Panopticon* merupakan sumber kekuasaan yang sangat besar bagi petugas penjara karena dapat mengawasi narapidana dipenjara secara total.⁵⁹ Razia busana Islami juga telah memberikan kekuasaan bagi Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam menjalankan pengawasan terhadap tubuh. Hal menarik ialah meskipun penerapan razia yang intens dilakukan pada hari-hari yang ditentukan hal ini justru membuat semacam jadwal rutin razia yang tentu saja sangat mudah dihindari. Ketika adanya razia busana banyak masyarakat yang mengambil jalan memutar arah dan menghindari lokasi razia. Informasi mengenai razia akan tersebar dengan sangat cepat melalui mulut ke mulut maupun jejaring sosial media.

⁵⁹Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison* (New York: Vintage Books, 1977), hlm. 265.

Meski hanya dilakukan dalam 3 (tiga) hari, namun efek yang diberikan cukup dirasakan oleh masyarakat. Sama seperti *panopticon* yang memberikan dampak kepada narapidana seakan-akan diawasi oleh sipir selama 24 jam penuh, razia busana Islami memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa saat ia keluar dari rumah suatu waktu petugas Wilayatul Hisbah akan melakukan razia. Seperti yang dikatakan ibu Arini (masyarakat), *“Saya kadang takut kalau keluar rumah nanti ada WH (Wilayatul Hisbah). Makanya sekarang kalau keluar rumah pakai jilbab. Tapi itu kalau keluar sore aja. Kalau pagi, misalnya antar anak sekolah cukup pakai helm saja. Jujur kadang-kadang suka takut juga kalau tiba-tiba ada razia, tapi kalau di Langsa gak pernah sejarahnya razia busana pagi-pagi. Palingan sore aja. Jadi lebih aman.”*⁶⁰

2. Ruang Kecil Syariat

Selama beberapa kali mengobservasi pelaksanaan razia busana muslim, peneliti menemukan teknis-teknis razia yang tidak berbeda dengan razia Polantas (Polisi Lalu Lintas) dalam menertibkan kendaraan bermotor. Menggunakan 2 (dua) jalur jalan Dinas Syariat Islam memimpin razia busana Islami dengan bantuan Wilayatul Hisbah, Polisi dan TNI. Keberadaan Wilayatul Hisbah, Polisi dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai pengamanan. Meski sebenarnya tugas Wilayatul Hisbahlah yang dapat melakukan penertiban busana muslim, keberadaan Polisi dan TNI di lokasi sebagai kekuatan tambahan.

⁶⁰Hasil wawancara dengan masyarakat yakni ibu Arini, seorang ibu rumah tangga.

Selama melakukan razia busana, Wilayatul Hisbah sering menghadapi pelanggar busana Islami yang memiliki keluarga di Kepolisian dan TNI. Kehadiran Polisi dan TNI diharapkan dapat menghadapi pelanggar-pelanggar yang memanfaatkan status keluarga anggota kedua angkatan bersenjata tersebut.

Dinas Syariat Islam hanya bertugas sebagai pencatat pelanggar busana yang telah terlebih dahulu di jaring oleh petugas WH. Tugas Dinas Syariat Islam sendiri tidak lebih mencatat para pelanggar dan memberikan dampingan pemahaman mengenai aturan berbusana. Dalam melakukan tugasnya Dinas Syariat Islam menempatkan meja dan beberapa kursi di bahu jalan. Terdapat 2 (dua) petugas perempuan Dinas Syariat Islam yang duduk di kursi yang biasanya bertugas menulis nama-nama masyarakat yang dirazia. Tidak jarang pula mereka juga bertindak layaknya penyidik yang menginterogasi para pelanggar syariat. Melalui meja sebagai titik pusatnya, terdapat 2 (dua) papan pemberitahuan yang menuliskan informasi sedang dilakukannya razia busana Muslim. Papan pemberitahuan inilah yang menandakan adanya pemberlakuan syariat Islam. Dengan masing-masing ujung papan dijaga oleh Wilayatul Hisbah. Wilayah ujung dari kedua kutub penandanya ini ditempatkan pengawas yang menyeleksi pelanggar busana Islami. Disinilah permainan kuasa terjadi saat menjaring para pelanggar. Pilihan mengenai siapa dan kriteria apa yang masuk dalam kategori bukan busana Islami berada sepenuhnya dalam kuasa si pengawas. Kepala Dinas Syariat Islam tidak lagi memiliki kuasa untuk menentukan, karena kekuasaan telah di distribusikan ke para pengawas yang berada di 2 (dua) penanda razia tersebut. Pengawas razia hanya bisa dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Proses

penyeleksian busana mana yang masuk kategori melanggar dan tidak melanggar sepenuhnya dibawah kendali Wilayatul Hisbah. Subjektivitas dari anggota Wilayatul Hisbah sangat terasa dalam menentukan dalam proses razia busana Islami. Para pengawas tidak jarang menjemput langsung para pelanggar yang didapati sedang mengendarai sepeda motor di jalan. Namun, dalam pantauan peneliti hanya para pelanggar yang telah melewati papan pengumuman saja yang terkena razia, tidak berlaku bagi yang diluar itu.

B. Respon Masyarakat Terhadap Penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 Tentang Berbusana Islami

Diantara masyarakat ada yang menilai bahwa hukuman yang diberikan kepada muslimah yang terjaring razia tidak memakai busana Islami sangat mendidik dan membina. Pihak petugas Dinas Syari'at Islam mengancam akan memberi sanksi cambuk apabila nama masyarakat yang terkena razia terdapat 3 (tiga) kali tercatat dalam razia busana Islami. Untuk membuat masyarakat jera, hukuman cambuk yang dibuat itu hanya sebatas ancaman, sampai saat ini belum ada masyarakat yang dicambuk akibat terjaring razia busana Islami. Pihak Dinas Syari'at Islam khususnya petugas Wilayatul Hisbah yang bertugas merazia di jalan hanya memberikan hukuman seperti menyuruh masyarakat tersebut untuk menggunakan sarung yang telah disediakan oleh petugas, mencatat nama mereka kepada petugas, serta dinaikkan ke mobil dinas untuk dibawa ke kantor Dinas Syari'at Islam dan diberi binaan tentang busana Islami yang seharusnya dikenakan.

Selain itu, ada juga masyarakat yang terkena razia merasa dipermalukan karena pihak Dinas Syari'at Islam menyuruh mereka yang di razia menggunakan sarung dan naik ke mobil dinas, mereka berpikir mereka yang terkena razia seperti tersangka penculikan yang ditangkap oleh pihak polisi dan diperlihatkan oleh masyarakat luas.⁶¹Cara seperti itu memang sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat yang terjaring razia busana Islami, mereka dibawa ke kantor dengan mobil terbuka dan diperlihatkan oleh banyak orang di jalanan. Dengan cara seperti itu membuat mereka merasa malu serta jera agar tidak terulang kembali di hari selanjutnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, masyarakat muslim di Kabupaten Kota Langsa Provinsi Aceh sebenarnya mendukung sepenuhnya kewajiban memakai busana Islami. Bahkan masyarakat Kota Langsa sangat mendukung pelaksanaan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang aqidah, ibadah, dan Syariat Islam.

C. Penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 tentang berbusana islami di Kota Langsa terhadap wisatawan yang berkunjung di Kota Langsa

Wisatawan adalah orang yang mendukung atau melakukan kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk rekreasi, melakukan bisnis dan profesional, hiburan bahkan ada yang melakukan kegiatan lainnya seperti ziarah dan penelitian.⁶²

⁶¹Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang terkena razia, pada 29 Oktober 2019, pukul 17.00 WIB.

⁶² Goeldner, C. R. & Ritchies, J. R. B. *Tourism, Principles Practices, Philosophies, Eleventh Edition* (United States Of America: John Wiley & Sons. Inc, 2003), hlm.7-8 (<https://books.google.co.id/books>).

Dalam ketetapan MPR RI nomor IV tahun 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bagian Sosial Budaya tentang Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata di Indonesia melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat *interdisipliner* dan *partisipatoris* dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan.⁶³

Menurut peraturan pemerintah undang-undang no. 67 tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan, masih sama dengan undang-undang nomor 9 tahun 1990 wisata merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.⁶⁴ Secara resmi dalam kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang berwenang menangani kebudayaan dan kepariwisataan dalam UU no. 10 tahun 2009 yaitu berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.⁶⁵

Di Aceh sendiri tepatnya di Banda Aceh yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh telah menjadi tempat atau daerah yang sangat banyak sektor wisatanya. Beberapa tahun setelah kejadian tsunami Banda Aceh telah kembali didatangi oleh para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Banda Aceh

⁶³ Nadjamuddin Ramly, *Pesona Jakarta: Kota Wisata Ramah Lingkungan* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu Jakarta, 2007), hlm. 45.

⁶⁴ Bungaran Antonius Simanjutak dkk, *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor, 2017), hlm. 2

⁶⁵ Adi Wirawan, *Health Kesehatan Pariwisata: Aspek Kesehatan Masyarakat di Daerah Tujuan Wisata*, dalam jurnal ISSN nomor 1, Vol. 3, (2016), hlm. ix

menerapkan sistem wisata islami untuk para wisatawan yang berkunjung, dikarenakan Aceh telah dikenal sebagai serambi mekah atau bermayoritas masyarakatnya adalah orang muslim. Seperti didalam Qanun No 11 tahun 2002 tentang syi'ar Islam yakni dalam hal berbusana, pihak Pemerintah Aceh melakukan syi'ar ini tidak hanya kepada masyarakat setempat saja, tetapi para wisatawan yang beragama muslim pun diberi pengetahuan seputar busana yang layak dikenakan menurut ajaran agama Islam.

Dilihat dari ibukota yang sudah menerapkan sistem wisata islami untuk wisatawan yang berkunjung, maka Kota Langsa pun mengikuti hal serupa untuk ditetapkan di Kota Langsa. Tetapi masih kebanyakan wisatawan tidak mengetahui wisata islami apa dan seperti apa yang harusnya mereka ketahui. Jadi pihak Dinas Syari'at Islam Kota Langsa mencoba untuk menerapkan wisata islami itu seperti apa. Contohnya dengan dipasangnya baliho tentang busana yang seharusnya digunakan kaum wanita seperti, baliho untuk tidak memakai busana yang membuka aurat, atau lain sebagainya.⁶⁶

Pemaknaan wisata islami dilihat dari dua suku kata yaitu wisata dan Islam dalam istilah bahasa Indonesia gabungan dua kata memiliki satumakna khusus atau makna baru. Wisata dikenal dengan suatu proses berpergian atau perjalanan sementara secara bersama-sama (kelompok) maupun individu dari satu tempat ke tempat lain.⁶⁷

⁶⁶Hasil wawancara dengan Bapak Azhar, S.SOS.I, selaku KASI Hubungan Masyarakat Dinas Syari'at Kota Langsa.

⁶⁷Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm.3.

Islam sebagai Addin (agama) merupakan sistem sosial masyarakat yang sangat berfungsi untuk kehidupan manusia karena Agama adalah salah satu tindakan yang terdapat pada diri seseorang tentang kepercayaan terhadap kekuatan tertentu (ghaib atau spritual) dan agama mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat. Disisi lain kegiatan pariwisata merupakan bagian dari aspek sosial masyarakat. Oleh karena itu, antara pariwisata dan agama juga saling berhubungan. Konsep pemaknaan pariwisata didalam Islam tentu saja tidak bisa hanya dilihat dari pemaknaan pariwisata semata akan lebih jelas bila merujuk kepada ajaran agama Islam itu sendiri, yaitu sebuah ajaran membawa pada kebaikan dan dakwah dalam aspek kepariwisataan. Karena Agama selalu mengajarkan kebaikan dan kedamaian dalam setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu, hal tersebut dapat diperoleh pada saat berwisata atau sedang melakukan perjalanan oleh individu atau kelompok bertemu dengan individu atau kelompok lain baik yang melakukan wisata maupun penduduk (masyarakat) yang tinggal di tempat wisata yang dikunjungi wisatawan, disinilah Islam mengingatkan atau mengajarkan kepada manusia untuk saling berdakwah dalam menyebarkan kebaikan.⁶⁸

Istilah lain dari wisata Islam adalah wisata syari'ah wisata halal, wisata ziarah, wisata religi. Dari bermacam-macam tersebut berkaitan dengan ajaran keagamaan serta semua istilah pariwisata tersebut bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di dunia khususnya di Indonesia sebagai cara untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia menjunjung tinggi nilai budaya dan nilai-nilai Islam

⁶⁸Muhammad Julijanto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*(Yogyakarta: Depublish, 2015), hlm. 2.

berdasarkan keunikan daerahnya masing-masing. Pariwisata adalah suatu pariwisata dengan dimensi moral baru yang didasarkan kepada nilai-nilai yang dapat diterima, berdimensi etis dan memiliki standar transental yaitu sebuah perjalanan yang bertujuan keselamatan dengan motivasi Islam. Disamping itu, sebuah perjalanan dapat membawa manfaat yang baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain (manusia) sebab dalam perjalanan dapat memperhatikan orang-orang lain disekelilingnya.⁶⁹

Islam memandang kegiatan pariwisata sesuai dengan ajaran Islam, jika tujuan wisata hanya untuk membawa keburukan atau kemudharatan maka agama memandang tersebut adalah negatif dan tidak sesuai dengan ajaran agama akan tetapi sebaliknya jika wisata tujuannya untuk kebaikan dan tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka pandangan agama adalah positif. Karena Islam sangat menganjurkan untuk selalu melakukannya untuk kebaikan dan bernilai positif serta dilaksanakan dengan cara yang baik selalu bernilai ibadah.

Untuk pariwisata didalam Al Qur'an dan sunnah tidak ditemukan secara harfiah, tetapi terdapat beberapa kata yang merujuk kepada arti dari lafadz-lafadz yang berbeda dan untuk secara umum maknanya sama.⁷⁰

Kata wisata sebagai *'Sara-Yasiru-Siru Sairan-Saiyaratan* : berjalan, melakukan perjalanan, dari kata tersebut dijumpai kata *saiyar*,

⁶⁹Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), hlm. 4.

⁷⁰ Johar Arifin, *Wawasan Al-qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata*, dalam Jurnal AnNur Nomor 2, Vol.4 (2015), hlm. 149

muannatsnyasaiyarah dengan makan menempuh perjalanan artinya mobil.⁷¹ Dalam *Sara Yasiru* terdapat dalam (QS. Al-Ankabut [29]: 20)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (النكبت / ٢٩:٢٠)

Artinya :Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Aktivitas pariwisata yakni sebagai *rihlah* yang artinya aktivitas perjalanan satu tempat dengan tujuan tertentu terdapat di dalam (QS. Quraisy [106]: 2)

إِذَا فِيهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (قریس / ١٠٦:٢)

Artinya :(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.

Dalam Surat dijelaskan bahwa kebiasaan suku quraisy tersebut melakukan perjalanan bisnis atau berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musin panas ke negeri Syam. Adapun tujuan *rihlah* tersebut adalah :⁷²

- a. *Rihlah tijarah* (wisata bisnis)
- b. *Rihlah ilmiah*
- c. *Rihlah dakwah* (penyebaran agama)
- d. *Rihlah diplomasyah* (wisata kenegaraan atau diplomasi)

⁷¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm. 187.

⁷²*Ibid*, hlm.187.

Pariwisata sebagai safar dalam bahasa Arab *safara yafuru* yang artinya pergi, atau perjalanan. Istilah wisata sebagai *safar* berkaitan dengan aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dan menuntut sebagai perintah untuk berjalan dimuka bumi di beberapa tempat sebagai peringatan. Terdapat dalam (QS.Ali Imran ayat [03]: 137)



Artinya :*Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).*

Selain wisata (*safar*) sebagai perintah dan sebagai peringatan terhadap manusia, wisata juga untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati keindahan alam yang telah diciptakan Nya. Selain di daerah Aceh, Indonesia banyak juga negara-negara muslim maupun non-muslim ikut mengembangkan wisata islami sesuai dengan standar daya tarik wisata yang ada atau sesuai dengan perkembangan zaman.

Pariwisata Islami (*Islamic Tourism Standar*) didasarkan pada tiga karakteristik yakni :⁷³

- a. Membutuhkan jaminan halal dalam semua aspek kehidupan.

⁷³Rieka Widawati dan HP. Diyah Setiyorini, *Perspektif Sosiolinguistik: Dialog antara Islam dan Non-Islam tentang Standarisasi Pariwisata Islami*, dalam Jurnal Manajemen Resort & Leisure Nomor 2, Vol. 11 (2014), hlm. 2-5.

- b. Memerlukan shalat atau doa sebagai kegiatan rutinitas sehari-hari yang tidak boleh ditinggalkan.
- c. Memiliki semangat yang kuat dalam persaudaraan dan perdamaian.

Aceh sebagai Nanggroe Islam dan menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Banyak perhatian para wisatawan dengan beberapa tipologi wisata yang terkenal contohnya seperti tempat sejarah, museum, mesjid, dan lain-lain. Selain itu Aceh dilatar belakangi dengan ragam budaya, etnis suku membuat para wisatawan asing tertarik untuk datang ke Aceh sebagai daerah tujuan wisata khususnya wisata Islami atau sering disebut wisata halal. Sehingga, banyak masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Aceh berasal dari berbagai daerah luar Aceh bahkan luar negeri.

Kota Langsa merupakan salah satu daerah di Aceh yang ikut dalam mengembangkan sektor pariwisata dengan cara wisata Islami. Kota Langsa memiliki beberapa tempat wisata yang mengundang para wisatawan luar untuk datang dan berlibur di Kota Langsa. Tempat wisata yang mungkin tidak asing lagi ditelinga wisatawan seperti Hutan Mangrove, Pelabuhan Kuala Langsa, dan Taman Hutan Kota Langsa. Tempat-tempat itu sudah tidak asing lagi dikarenakan tempat itu yang merupakan ciri khas dari Kota Langsa. Seperti Hutan Mangrove pada 22 November 2019 lalu mendapatkan penghargaan Anugerah Pesona Indonesia tahun 2019 dengan kategori Ekowisata Terpopuler yang diserahkan oleh staf ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni Bapak Guntur Sakti dan diterima langsung oleh Walikota Langsa yaitu Bapak Usman Abdullah, SE. Selain sebagai Ekowisata Terpopuler Mangrove Langsa *Forest Park* atau Hutan

Mangrove ini juga dinobatkan sebagai *Most Favorite Tourism* (pariwisata paling favorit) di tahun 2019 oleh Kementerian Pariwisata.

Sebelum mendapatkan penghargaan itu semua Hutan Mangrove juga telah ramai didatangi pengunjung yang berasal dari berbagai daerah. Tetapi dengan mendapatkan penghargaan tersebut, Hutan Mangrove semakin ramai didatangi pengunjung terutama pada hari libur. Selain Hutan Mangrove wisatawan juga banyak berdatangan kepelabuhan Kuala Langsa serta rela mengeluarkan uang sebesar Rp 15.000 menyebrang ke pulau Teulaga Tujuh untuk melihat laut lepas yang dilengkapi dengan pasir lautnya. Tidak hanya tempat wisata air laut Kota Langsa juga memiliki Taman Hutan Kota yang dilengkapi beberapa wahana permainan serta kebun binatang yang dilengkapi dengan nama-nama hewan dan asal hewan tersebut.

Di Kota Langsa sendiri baru saja menerapkan wisata Islami kepada masyarakat atau para wisatawan yang hendak berlibur ke tempat-tempat wisata. Jajaran pemerintah sudah memasang baliho-baliho tentang tata berpakaian yang layak bagi seorang muslim di depan pintu masuk lokasi wisata. Selain itu wilayatul hisbah juga ditugaskan untuk selalu berpatroli di tempat wisata dengan tujuan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Wilayatul Hisbah tersebar di daerah wisata. Setiap daerah wisata terdapat dua ataupun tiga petugas wilayatul hisbah yang berjaga di depan pintu masuk

wisata. Untuk hari libur kemungkinan petugas yang berjaga ditambah karena dilihat dari bertambahnya jumlah pengunjung yang datang.⁷⁴

Untuk di daerah wisata petugas tidak merazia, tetapi hanya memberikan nasehat terhadap para pengunjung yang memakai busana tidak sesuai ajaran agama Islam. Kebanyakan para wisatawan datang dari luar daerah, luar Aceh, bahkan ada beberapa wisatawan yang datang dari luar Negeri.

Wisatawan yang datang ada yang beragama muslim, dan ada juga yang non muslim. Petugas memberikan penjelasan terhadap Qanun No 11 Tahun 2002 tentang busana Islami kepada masyarakat yang beragama muslim, mereka juga menjelaskan peraturan ini sudah ditetapkan di Kota Langsa sebagai peraturan daerah. Dan untuk wisatawan non muslim, kebanyakan dari mereka hanya tidak menggunakan kerudung atau jilbab serta menggunakan baju yang berlempang pendek, untuk bawahannya mereka sadar atau sudah mengetahui dari beberapa orang lainnya bahwasanya di Aceh harus menggunakan pakaian yang sopan. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan rok pendek maupun celana pendek seperti pada umumnya orang non muslim. Sama halnya dengan wisatawan luar negeri, mereka juga sudah mengetahuinya dari *tour gate* mereka.

Petugas wilayatul hisbah hanya memberikan sedikit penjelasan tentang cara berbusana yang diterapkan oleh orang non muslim, tidak hanya itu petugas juga memberikan selendang kepada wisatawan yang tidak menggunakan kerudung atau

⁷⁴Hasil wawancara dengan Bapak Azhar, S.SOS.I, selaku KASI Hubungan Masyarakat Dinas Syari'at Kota Langsa.

jelbab serta bajunya berlengan pendek, dengan tujuan untuk menutupi tangannya yang terlihat, tetapi tidak menyuruh mereka untuk menutupi rambut mereka.⁷⁵

Untuk wisatawan yang datang berkunjung ke Kota Langsa sudah mengetahui tentang penerapan busana Islami melalui pemandu atau orang yang membawa mereka ke Kota Langsa. Menurut para wisatawan itu merupakan suatu kebijakan yang bagus serta terlihat unik dibandingkan dengan daerah lain yang tidak memikirkan sampai ke tingkat busana pengunjungnya. Tetapi ada juga para pengunjung yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah daerah. Mereka merasa, HAM yang sudah ada disetiap individu sebagai warga negara Indonesia telah dibatasi oleh pemerintah Kota Langsa. Mereka ingin ketika berlibur tidak ada aturan-aturan lagi untuk setiap individu, karena tujuan untuk berlibur itu menenangkan pikiran dari beban-beban kerjaan atau lain sebagainya, tetapi malah sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab, maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 sebenarnya memiliki beberapa faktor pendukung untuk mensukseskannya pelaksanaan Qanun ini di

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Azhar, S.SOS.I, selaku KASI Hubungan Masyarakat Dinas Syari'at Kota Langsa.

lapangan, dan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kehidupan masyarakat Aceh yang religius, adanya instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayatul hisbah.

2. Masyarakat Kota Langsa sendiri memilih untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Menurut mereka hal tersebut baik dan menuju kebaikan. Namun masih diperlukan sikap dan cara wilayatul hisbah dalam merazia dan memberikan nasehat yang terkadang kurang sopan.
3. Banyak para pengunjung yang datang berkunjung ke Kota Langsa. Mereka berlibur di Kota Langsa untuk mengetahui tempat wisata yang ada di Kota Langsa. Tidak hanya dari luar daerah bahkan ada beberapa yang datang dari luar Negeri. Untuk para wisatawan yang muslim, apabila terdapat memakai pakaian ketat atau tidak menggunakan kerudung atau jilbab, petugas yang berada di pintu masuk wisata pun memberikan penjelasan terkait dengan Qanun No 11 Tahun 2002 tetapi tidak merazia mereka, dengan alasan mereka tidak mengetahui peraturan ini. Serta untuk para wisatawan yang non muslim, petugas memberikan selendang untuk mereka kenakan guna menutupi tangan jika mereka memakai baju yang berukuran minim.

B. Saran

Semoga dengan adanya penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 ini, menjadikan masyarakat Kota Langsa untuk berpakaian sesuai dengan ajaran agama Islam, dan

tidak hanya masyarakat untuk pengunjung yang datang dari luar daerah juga begitu.

Untuk Pemerintah lebih ditingkatkan kembali jam pada saat merazia, tidak hanya dilakukan pada sore hari namun juga dilakukan pada pagi atau siang hari agar penerapan Qanun No 11 Tahun 2002 ini lebih efektif dengan ditambahkan jam razia, dan membuat masyarakat sadar akan busana yang mereka gunakan, dan mulai memakai pakaian yang sesuai ajaran agama Islam dari kesadaran diri bukan karena hanya ada petugas wilayatul hisbah yang merazia saja. Dan apabila masih banyak masyarakat yang tidak patuh akan adanya peraturan, maka pihak petugas memberikan sanksi yang tepat kepada masyarakat apabila melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.
2008.

Adlin, Alfatri, *Menggeledah Hasrat; sebuah Pendekatan Multi Perspektif*.
Yogyakarta: Jalasutra, 2006.

- Al Mansur, Abu Abdillah. *Wanita dalam Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1986.
- Al-Qarawi, Yusuf. *Cadar Antara yang Mewajibkan dan Membid'ahkan*. Jakarta: Al Kausar, 1997.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- An Al-Nawi, Syamsudin Rama. *Hukum Islam Seputar Busana dan Penampilan Wanita*. Yogyakarta: Ar-Rau oh Pustaka, 2007.
- Bawazir, Tohir. *Panduan Praktis Wisata Syari'ah*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013.
- C. R., Goeldner and Ritchies, J. R. B. *Tourism Principles Practices, Philosophies*. Eleventh Edition. United States Of America: John Wiley & Sons. Inc, 2003.
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. New York: Vintage Books, 1977.
- Julijanto, Muhammad. *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Depublish, 2015.
- Khan, Muhammad Shidiq Hasan. *Ensiklopedia Hadist Shahih : Kumpulan Hadist tentang Wanita*, Hikmah, 2009.
- Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Vol. XVI, No.2. Juli, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Majid, Abdul. *Syariat Islam dalam Realita Sosial*. Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar Raniry Pers. 2007.

- Mawadda. *Peran Wilayatul Hisbah dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat*. Medan: Universitas Islam Negeri SU Fakultas Ushuluddin, 2015.
- Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- Ramly, Nadjamuddin. *Pesona Jakarta: Kota Wisata Ramah Lingkungan*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu Jakarta, 2007.
- Ritonga, Dinda Utami. *Kecenderungan Kepribadian Introvert pada Wanita Bercadar*. Medan: Universitas Medan Area, 2016.
- Shahab, Husein. *Jilbab menurut Al Qur'an dan As Sunna*. Jakarta: Mizan. 1983.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Simanjutak, Bungaran Antonius dkk. *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pusaka Obor, 2017.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Suhandang, Kustadi. *Strategi Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Suwantoro, Gamal. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Swara, Puspa dan Syamsul Rizal Hamid. *1500 ++ Hadist dan Sunah Pilihan*. Puspa Swara, 2017.
- Thawilah, dan Abdussalam, Syaikh Abdul Wahhab. *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al Qur'an dan As Sunnah*. Jakarta: Almahira, 2007.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.

B. Undang – Undang

UU RI No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang

Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan

Wilayatul Hisbah Aceh.

C. Jurnal

Abubakar, Marzuki. *Syari'at Islam Di Aceh Sebuah Model Kerukunan dan*

Kebebasan Beragama. Vol. XIII. No 1, 2011.

Arifin, Johar. *Wawasan Al-qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata*. Vol.4. dalam

Jurnal AnNur Nomor 2, 2015.

Wirawan , Adi. *Health Kesehatan Pariwisata: Aspek Kesehatan Masyarakat di*

Daerah Tujuan Wisata. Vol. 3.dalam jurnal ISSN nomor 1, 2016.

Widawati, Rieka dan HP. Diyah Setiyorini. *Perspektif Sociolinguistik: Dialog*

antara Islam dan Non-Islam tentang Standarisasi Pariwisata Islami. Vol.

11.dalam Jurnal Manajemen Resort & Leisure Nomor 2, 2014.

D. Internet

Kemendagri, “*Peraturan Aceh*”, http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_Aceh_11_2002.pdf diakses pada 27 Februari pukul 13:00 WIB.

Website resmi <https://www.langsakota.go.id/>, diunduh 13 Maret 2019, Pukul

17.46.

Wikipedia, “*Kota Langsa*”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa, diunduh pada tanggal 28 November 2019, pukul 21:15 WIB.

Wikipedia, “*Qanun*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Qanun>, 2016, diunduh pada 02 September 2019.

Kementerian Pariwisata, “*Kajian Pengembangan Wisata Syariah*”
www.kemenpar.o.id/userfiles/2015, Diunduh pada 27 Februari 2020, pukul 13:00 WIB.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Foto bersama Kasi Hubungan masyarakat dan staf



Foto bersama Bapak dan Ibu Bidang Bina Syari'at Islam



Tanda peringatan kawasan razia busana Islami beserta petugas razia



Wilayatul Hisbah pada saat melakukan razia



Pintu Masuk Kawasan Wisata Hutan Lindung.

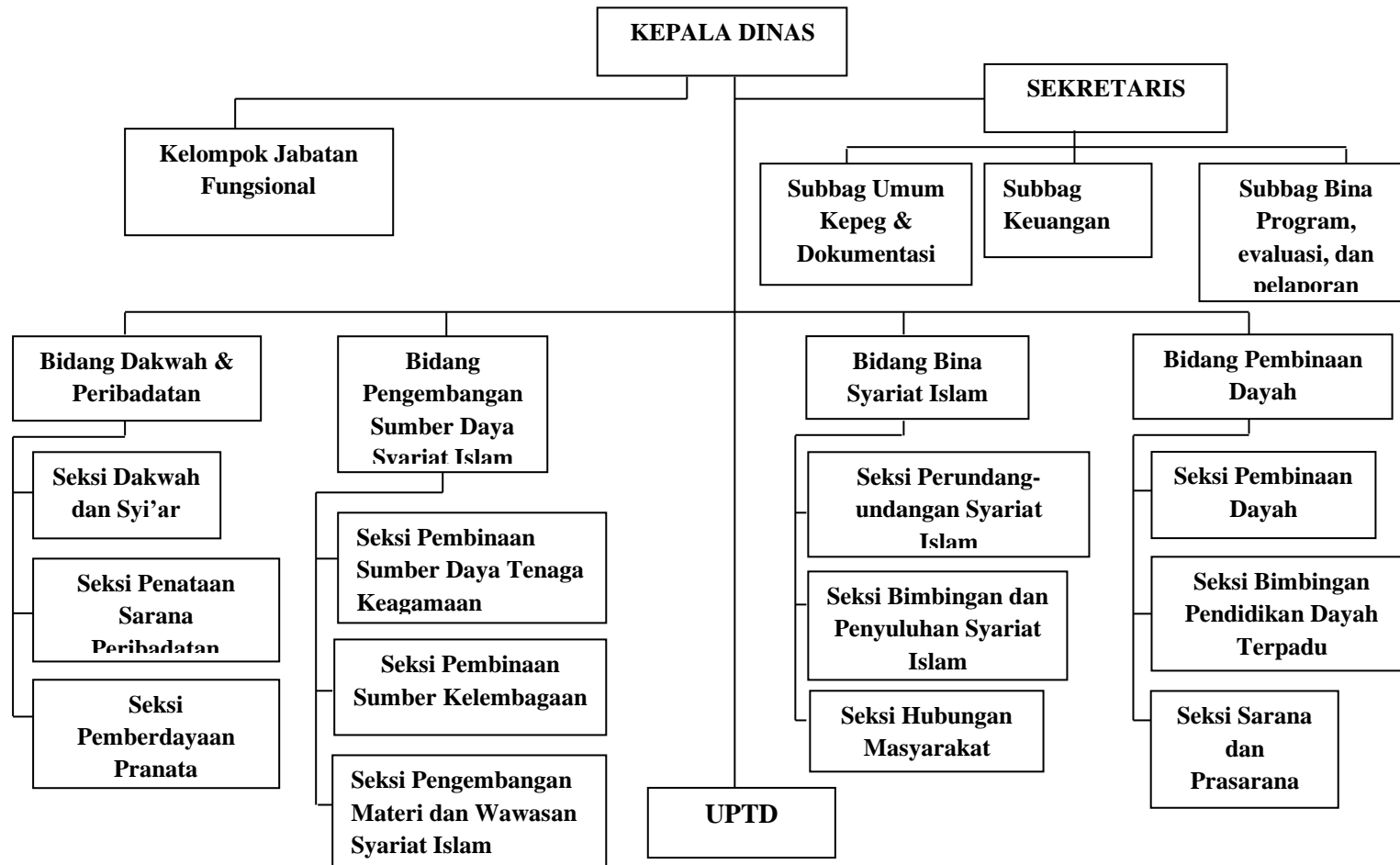


Turis Singapore berkunjung ke Hutan Mangrove (sumber: Website Kota Langsa, 22/11/2019)



Hutan Mangrove Kota Langsa

B. Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam Kota Langsa



C. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 11 TAHUN 2002**

**TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH
DAN SYT'AR ISLAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA**

GOVERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Menimbang :

- a. Bahwa aqidah dan ibadah merupakan bagian pokok pengamalan Syariat Islam yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan sehingga terbina dan terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan menjunjung tinggi ajaran Islam merupakan landasan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, baik pribadi, keluarga dan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan dan otonomi khusus, perlu penegasan hak-hak khusus tentang penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat :

1. Al-Quran;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 18 b dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 103);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 23) yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 75);
 11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 2000 Nomor 30);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH DAN
SYARIAH ISLAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah perang

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.

2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Syi'ar Islam adalah semua kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam.
6. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
7. Aqidah adalah Aqidah Islamiah menurut Ahlussunnah wal Jama'ah.
8. Ibadah adalah shalat dan puasa Ramadhan.
9. MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Penyidik adalah pejabat kepolisian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam.
11. Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengaturan pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam bertujuan untuk :

1. membina dan memelihara keimanan dan ketaqwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat;
2. meningkatkan pemahaman dan pengamalan. Ibadah serta penyediaan fasilitasnya;
3. menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan Syi'ar Islam.

BAB III

PEMELIHARAAN AQIDAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban membimbing dan membina aqidah umat serta mengawasinya dari pengaruh paham dan atau aliran sesat.
- (2) Setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab menanamkan aqidah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat;
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat;
- (3) setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama Islam.

Pasal 6

Bentuk-bentuk paham dan atau aliran yang sesat di tetapkan melalui fatwa MPU

BAB IV

PENGAMALAN IBADAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah - Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi dan suatu lingkungan yang kondusif untuk pengamalan ibadah.
- (2) Setiap keluarga/orang tua - bertanggung jawab untuk membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang ber4 di bawah tanggung jawabnya.

Pasal 8

- (1) Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at.
- (2) Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum at.

Pasal 9

- (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah.
- (2) Pimpinan gampong diwajibkan memakmurkan mesjid dan atau meunasah

dengan shalat berjamaah dan menghidupkan pengajian agama.

- (3) Perusahaan pengangkutan umum wajib memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan;
- (2) Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i dilarang makan minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan;
- (3) Selama bulan Ramadhan masyarakat di anjurkan untuk menega shalat tarawih dan mengerjakan amalan sunat lainnya.

Pasal 11

Setiap orang yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menghormati pengamalan ibadah.

PENYELENGGARAAN SYI'AR ISLAM

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat dianjurkan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam.
- (2) Setiap Instansi Pemerintah/lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan untuk mempergunakan tulisan Arab Melayu di samping tulisan Latin.
- (3) Setiap instansi Pemerintah/Lembaga Swasta dianjurkan untuk mempergunakan penanggalan Hijriah dan penanggalan Masihiyah dalam surat-surat resmi.
- (4) Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masihiyah.

Pasal 13

- (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah lembaga pendidikan badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.

BAB VI

PENGAWASAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUNAN

Pasal 14

- (1) Untuk terlaksananya Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk Wilayatul Hisbah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.

- (2) Wilayatul Hisbah dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) diberi wewenang untuk menegur/ menasihati si pelanggar.
- (4) Setelah upaya menegur/menasihati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku si pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.
- (5) Susunan organisasi Kewenangan dan tata kerja Wilayatul Hisbah diatur dengan Keputusan Gubernur setelah mendengar pertimbangan MPU.

Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun ini, dilakukan oleh:
 - a. Pejabat kepolisian Provinsⁱ Nanggroe Aceh Darussalam, atau
 - b. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk itu.
- (2) Syarat pengangkatan, kepangkatan dan kedudukan serta pemberhentian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) b pasal ini, berwenang :
 - a. menerima laporan dari Wilayatul Hisbah tingkat gampong atau dari seseorang tentang adanya pelanggaran Qanun ini;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - g. menghentikan penyidikan bila pelanggaran tersebut tidak cukup alasan untuk diajukan ke Mahkamah Syariaah;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat di atas penyidik wajib menjunjung tinggi Syariat Islam dan hukum yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Qanun untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim

Mahkamah Syar'iah.

- (2) Syarat pengangkatan, kepangkatan dan kedudukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Penuntut umum berwenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- b. mengadakan pra penuntutan apabila berkas perkara hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempurnaannya;
- c. membuat surat dakwaan;
- d. melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iah;
- e. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang ditentukan;
- f. melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- g. mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundangan;
- h. melaksanakan putusan hakim.

Pasal 18

Penuntut umum menuntut perkara pelanggaran Qanun ini yang terjadi dalam wilayah hukumnya.

BAB VII PENGADILAN

Pasal 19

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun ini diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah.

BAB VIII KETENTUAN UQUBAH

Pasal 20

- (1) Barangsiapa yang menyebarkan paham agama aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Barang siapa yang dengan sengaja keluar dari aqidah islam dan atau menghina atau melecehkan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) akan dihukum dengan hukuman yang akan diatur dalam Qanun tersendiri.

Pasal 21

- (1) Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa uzur syar'i sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau, hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 22

- (1) Barang siapa yang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya.
- (2) Barang siapa yang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 (dua) kali.

pasal 23

Barang siapa yang tidak berbusana islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilayatul Hisbah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan qanun ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak diatur dengan qanun ini dinyatakan tetap berlaku di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 14 Oktober 2002
07 Sya'ban 1423

GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Dito

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 06 Januari 2003
01 Dzulkaidah 1423

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Dito

THANTAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN
2002 NOMOR 54 SERI E NOMOR 15.

PENJELASAN ATAS

QANUN PROVINSI NANGGROE ACBH DARUSSALAM NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM BIDANG AQIDAH, IBADAH, DAN SYIAR ISLAM

I. UMUM

Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya. Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama, kemudian di praktekkan, dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat. Bahkan dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Nanggroe Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Nanggroe Aceh Darussalam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Nanggroe Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak "Adat bak Poteumeurhom, Hukum bak Syiah Kuala Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana". Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan para ulama, sebagai pewaris para rasul.

Sementara itu sejak pertengahan abad ke-20, baik karena alasan internal maupun eksternal Syariat Islam mulai ditinggalkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bersamaan dengan kondisi demikian, rakyat Nanggroe Aceh menuju masa-masa suram dan sampai sekarang dalam kondisi yang sungguh memprihatinkan. Selama itu pula sebagai rakyat Nanggroe Aceh merindukan berlakunya kembali Syariat Islam yang dapat mengantarkan Nanggroe ini untuk meraih kejayaannya dan berada pada posisi *Baldatun Thayibatun Warabbul Ghafur*.

Dengan munculnya era reformasi pada tahun 1997, semangat dan peluang Yang terpendam untuk memberlakukan Syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia muncul kembali, terutama di Nanggroe Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah. Semangat dan peluang tersebut kemudian terakomodir dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Peluang tersebut semakin dipertegas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu pada tingkat daerah pelaksanaan Syariat Islam telah dirumuskan secara yuridis

melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.

Secara umum Syariat Islam meliputi aspek aqidah ibadah, muamalah dan syariat akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut. Ketaatan terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang. Sedangkan ketaatan kepada aspek muamalah dan akhlak di samping ditentukan oleh kualitas iman dan taqwa atau hati nurani, juga dipengaruhi adanya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.

Dalam sistem, hukum Islam terdapat dua jenis sanksi; yaitu sanksi yang bersirat ukhrawi, yang akan diterima di akhirat kelak, dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum. Dalam banyak hal penegakan hukum menuntut peranan negara. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh negara. Di sisi lain suatu negara tidak akan tertib bila hukum tidak ditegakkan.

Upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah (Shalat dan Puasa Ramadhan) serta Syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari Aqidah dan Ibadah. Masalah substansi telah diatur oleh nash dan telah dikembangkan para ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman.

Dengan demikian upaya legislasi pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun ini adalah dalam upaya membina, menjaga, memelihara, dan melindungi aqidah orang Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dari berbagai paham dan atau aliran sesat. Pelanggaran aqidah yang diancam hukuman di dalam Qanun ini, hanyalah setiap orang yang menyebarkan paham dan atau aliran sesat. Sedangkan ancaman hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya akan diatur dalam Qanun tersendiri tentang HUDUD.

Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah, baik shalat Fardhu/Jumat maupun puasa Ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, mengingatkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal, serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Upaya tersebut perlu juga didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan syi'ar Islam, namun masih dalam lingkup nilai ibadah.

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, di samping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk

memposisikan diri dalam Taubat Nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai (upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap Qanun ini khususnya dan terhadap segala ketentuan Syariat Islam pada umumnya.

Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarganya.

Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP sekarang ini.

Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawasan, diberi peran untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati, sehingga kasus pelanggaran qanun ini yang diserahkan kepada penyidik untuk diusut dan diteruskan ke Pengadilan, adalah kasus pelanggaran yang sudah melalui proses/upaya peringatan /nasehat dan bimbingan terhadap sipelaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Paham sesat adalah pendapat-pendapat tentang aqidah yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran atau Hadits Sahih, atau penafsiran yang tidak memenuhi persyaratan metodologis atas kedua sumber tersebut di bidang aqidah.

Pasal 3 dan Pasal

4 Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini tidak untuk menghalangi kebebasan ilmiah, kepentingan penelitian, pengkajian dan pengembangan ajaran Islam itu sendiri di perguruan tinggi atau lembaga ilmiah lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan atau institusi masyarakat harus aktif dan berinisiatif mendorong serta menyediakan fasilitas sekaligus memotivasi masyarakat sehingga mudah dan nyaman mengamalkan ibadah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan uzur Syar'i adalah keadaan yang menurut fikih membolehkan seseorang tidak menghadiri Shalat Jum'at, seperti musafir, sakit, atau melakukan tugas darurat seperti perawat atau dokter jaga (dinas).

Ayat (2)

Instansi Pemerintah adalah Instansi Sipil dan Militer. Kantor pemerintah dan swasta, serta badan usaha wajib memberi kesempatan kepada karyawannya untuk melaksanakan Shalat Jum'at; lebih dari itu semua kegiatan harus dihentikan, kecuali yang menyangkut kepentingan umum dan darurat (emergency). Mesjid-mesjid dianjurkan untuk menyediakan tempat shalat Jum'at bagi orang perempuan.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemimpin kantor, sekolah atau badan usaha wajib berinisiatif sehingga shalat berjamaah dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan di lingkungan masing-masing.

Ayat (2)

Adanya azan pada setiap awal waktu dan terlaksananya shalat fardhu berjamaah dan pengajian secara berkesinambungan menjadi tanggung jawab pimpinan gampong terutama Tengku Imuem.

Pengajian agama meliputi pengajian untuk anak-anak, remaja dan dewasa, baik laki-laki atau perempuan.

Ayat (3)

Pengemudi angkutan umum harus menghentikan kendaraan untuk memberi kesempatan kepada penumpang melaksanakan shalat fardhu.

Setiap kantor perusahaan/perwakⁱlannya harus menyediakan tempat shalat bagi langganan (calon penumpangnya). Kecuali di dekat kantor tersebut ada tempat shalat yang memenuhi syarat dan dapat dipergunakan.

Pasal 10

Ayat (1)

Menyediakan fasilitas/ peluang, adalah seperti membuka warung dan restoran pada siang hari Ramadhan, atau menjual makanan dan minuman yang patut diduga akan dikonsumsi sebelum waktu berbuka puasa.

Uzur syar'i adalah keadaan yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Jadi

boleh menjual makanan kepada orang musafir dan orang sakit.

Ayat (2)

Tempat umum adalah tempat terbuka yang dapat didatangi atau dilihat oleh siapa saja. Sedang di depan umum adalah di depan orang lain, seperti di dalam kendaraan umum, ruang tunggu atau kantor.

Ayat (3) dan Ayat

(4) Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Peringatan hari-hari besar Islam tidak boleh dilakukan dengan kegiatan yang tidak sejalan (sesuai) dengan ketentuan ajaran Islam.

Ayat (2) dan Ayat

(3) Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dokumen resmi adalah seperti: Akte notaris, ijazah, Akte Kelahiran dan Sertifikat Tanah.

Pasal 13

Ayat (1)

Busana islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Ayat (2)

Wajib membudayakan busana islami, maksudnya bertanggung jawab terhadap pemakaian busana islami oleh pegawai, anak didik atau karyawan (karyawati) di lingkungan masing-masing termasuk pada saat kegiatan olah raga.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Pejabat Kepolisian Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Pejabat Kepolisian yang diberi tugas di bidang penegakan Syariat Islam.

Ayat (2)s/d Ayat(5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Tata cara pelaksanaan hukum cambuk akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat dua

Penjatuhan hukuman ini hanya dapat dilakukan setelah melakukan proses peringatan oleh Wilayatul Hisbah, dan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan sosial dari orang yang bersangkutan. Hukuman ta'zir di sini hendaklah diarahkan kepada pendidikan dan pembinaan, bukan untuk semata-mata penghukuman dan atau penjeraan.

Pasal 22
Ayat (1)
Pembayaran denda disetor langsung ke Badan Baitul Mal. Sementara Badan Baitul Mal belum terbentuk, disetor ke Bazis Kabupaten/Kota setempat.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Pengawasan dan peringatan terhadap pasal ini dititikberatkan pada upaya penyadaran, pembimbingan dan pembinaan. Hukuman ta'zir akan dijatuhkan kalau pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang dan telah mendapat peringatan dari Wilayatul Hisbah, atau dilakukan secara mencolok sehingga bertentangan dengan kepatutan dan rasa kesopanan masyarakat Penjatuhan ta'zir ini pun hendaknya dimulai dengan yang paling ringan

Pasal 24 sampai dengan Pasal 27
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM TAHUN 2002 NOMOR 5**